



Buletin
AgFor
SULAWESI

Agroforestry and Forestry
Agroforestri dan Kehutanan

KUMPULAN KISAH SUKSES





REDAKSIONAL

Penyunting:

Amy Lumban Gaol
Endri Martini
Rahayu Subekti

Desain dan tata letak:

Tri Yudianto
Amy Lumban Gaol

Informasi lebih lanjut:

Amy Lumban Gaol
Communications Coordinator
a.gaol@cgiar.org

Kunjungi situs kami:

www.worldagroforestry.org/agforsulawesi


compact disc case

EDISI KHUSUS BULETIN



KUMPULAN KISAH SUKSES

November 2016



Tentang AgFor

- Proyek Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun dengan dukungan dari Global Affairs Canada, dan bertujuan untuk meningkatkan matapencaharian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para petani dan masyarakat kecil melalui sistem agroforestri dan pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre (ICRAF), dengan fokus pada tiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: matapencaharian, tata kelola dan lingkungan. Tahun 2016, proyek AgFor memasuki tahap terakhir implementasinya dan telah memulai pelaksanaan kegiatan pascaprojek (*exit strategy*) untuk menjaga keberlanjutan capaian proyek di masyarakat.

Kata Pengantar

Proyek Agroforestry and Forestry (AgFor) di Sulawesi: Menghubungkan Pengetahuan dengan Aksi memulai kegiatannya pada tahun 2011 dengan dukungan dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC), yang sebelumnya bernama Canadian International Development Agency (CIDA). AgFor telah meningkatkan sistem mata pencaharian berbasis agroforestri dan kehutanan yang berprinsip kesetaraan dan keberkelanjutan bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi. Selama lebih dari lima tahun terakhir, proyek ini telah bekerja dengan berbagai kelompok masyarakat, sektor swasta, dan perwakilan pemerintah di 10 kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Proyek yang sukses secara luar biasa ini akan berakhir pada bulan Desember 2016.

Edisi terakhir buletin AgFor ini merupakan kumpulan kisah sukses dari semua daerah kerja AgFor yang telah dipersiapkan secara mendetil oleh tim AgFor, mitra petani, perwakilan pemerintah, dan para jurnalis warga.

Kisah dari **Sulawesi Selatan** bercerita mengenai produksi dan penggunaan pupuk organik yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani; dan pentingnya berbagi pengetahuan serta informasi dalam meningkatkan kapasitas lokal, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan serta kehidupan para petani binaan AgFor.

Kisah dari **Sulawesi Tenggara** bercerita mengenai keberhasilan agroforestri dalam menghijaukan desa, semangat agroforestri yang disebarkan dari Sulawesi Tenggara ke Aceh, dan transformasi sampah pertanian menjadi uang di masyarakat binaan AgFor. Tulisan lainnya menceritakan dukungan pemasaran dari tim proyek yang telah memperluas kesempatan pemasaran para petani madu melalui peningkatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan; dan pentingnya kesepakatan dalam pemilihan jenis pohon untuk mendukung suksesnya pengelolaan hutan yang kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kelestarian blok khusus Tahura Nipa-Nipa.

Dari **Gorontalo**, artikelnya mengisahkan tentang berbagai fasilitas kompos yang diinisiasi oleh AgFor, yang kini mendapat banyak dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lokal. Kisah lainnya bercerita mengenai kontribusi positif AgFor dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan pengendalian erosi tanah melalui sistem teras vegetasi alami; dan juga, pengembangan kemitraan antara penghasil bibit setempat dan penangkar/tempat penjualannya.

Saat buletin ini diproses, proyek AgFor telah berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan di Sulawesi: lebih dari 630.000 orang telah mengalami peningkatan pendapatan sebagai hasil dari penerapan teknologi-teknologi agroforestri yang dipromosikan oleh AgFor; dan sekitar 740.000 ha penggunaan lahan agroforestri, pertanian dan kehutanan kini telah dikelola secara berkelanjutan.

Kabar bagusnya adalah meskipun proyek ini akan segera berakhir, akan tetapi dampak positifnya diharapkan terus berlanjut. Tim AgFor dan para mitranya telah merancang strategi pascaprojek dimana berbagai kegiatannya memastikan dampak yang berkelanjutan. Para mitra utama – dari masyarakat desa sampai perwakilan pemerintah – telah mengetahui dan sangat mendukung kegiatan strategi pascaprojek ini. ■

Selamat membaca!

James M. Roshetko
Pemimpin Proyek AgFor Sulawesi



DAFTAR ISI

- 3 Kata Pengantar
- 4 Daftar Isi
- 5 Kisah Sukses dari Sulawesi Selatan
- 15 Kisah Sukses dari Sulawesi Tenggara
- 35 Kisah Sukses dari Gorontalo



Kisah Sukses dari Sulawesi Selatan

- 6 Peran AgFor pada Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
- 8 Kerja Nyata AgFor di Desa Cikoro, Kabupaten Gowa
- 10 AgFor dan Kontribusinya dalam Penyebaran Informasi dan Pengetahuan
- 12 Tim AgFor Sulawesi: dari Pupuk Kimia Beralih ke Pupuk Organik

Peran AgFor pada Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng

Penulis: Christine Mailoa dan Amy Lumban Gaol

Selama kurang lebih lima tahun sejak proyek AgFor masuk ke Sulawesi Selatan tahun 2012, dampak dan perubahan yang dihasilkan mulai terasa. Secara khusus di Kabupaten Bantaeng, manfaat dan dampak positif kegiatan AgFor tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan para petani di tingkat bawah, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan di pihak pemerintahan.

Ditemui pada Hari Senin, 29 Agustus 2016 di Pantai Marina, Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Nurdin Abdullah, menyempatkan diri untuk memberikan opini pribadinya terkait proyek AgFor di area kerjanya. Beliau mengatakan bahwa 'pekerjaan rumah' yang dia harus kerjakan sejak periode pertama masa jabatannya sangatlah banyak. Salah satu masalah yang berkepanjangan yang belum terselesaikan adalah banjir rutin yang melanda masyarakat Bantaeng tiap tahunnya.

Telah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk penanggulangannya, seperti

membuat cekdam bagi petani, memanfaatkan dan memperbanyak hutan lindung, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara maksimal. "Namun demikian, saya menyadari bahwa semua usaha tersebut harus dibarengi dengan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Masalah selanjutnya yang dihadapi adalah ketidapkahaman masyarakat akan pentingnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu sangatlah penting untuk dapat merubah dan membangun pola pikir masyarakat, khususnya para petani." ujar Sang Bupati.

Sejalan dengan misinya, tim AgFor melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada pelatihan-pelatihan bagi para petani dan masyarakat guna membangun pola pikir dan pemahaman akan pentingnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan SDA.

Bagi Bapak Nurdin Abdullah, indikator keberhasilan yang telah dilakukan oleh AgFor adalah, tentu saja yang paling penting, pola pikir masyarakat yang telah berubah. "Pelatihan dan

ketrampilan yang diberikan oleh AgFor untuk masyarakat desa sangat berdampak pada perbaikan kesejahteraan," tambahnya. Kondisi saat ini, yang merupakan dampak dari kegiatan AgFor, sangatlah meringankan pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam membangun yang sekaligus juga dapat membantu terciptanya kelestarian lingkungan di Bantaeng.

Keberhasilan dan manfaat kegiatan AgFor yang dirasakan oleh Nurdin Abdullah juga dirasakan oleh Kepala Bappeda Bantaeng, Prof. Dr. Syamsu Alam. Ditemui di waktu yang sama, beliau juga menyampaikan opininya tentang bagaimana AgFor membantu Kabupaten Bantaeng dalam masalah-masalah yang ada tahun-tahun sebelumnya dan tentu saja masih sangat dibutuhkan bantuannya untuk masa ke depannya. Apresiasi yang diberikan terhadap AgFor bukan hanya karena telah meningkatkan pemahaman masyarakat dan kaum petani, namun juga terhadap pemangku kepentingan lainnya. "AgFor sangat banyak

memberikan bantuannya yang efektif, salah satunya adalah dengan adanya kegiatan dan program untuk meningkatkan pengetahuan terhadap jajaran pemangku kepentingan,” tambahnya. Beliau mengatakan bahwa pengembangan SDM sangatlah penting, bukan hanya berfokus terhadap masyarakat, tetapi juga pemangku kepentingan dan/ atau kepada para pemimpin desa. “Salah satu hasil penting berkat tim AgFor kegiatan memfasilitasi terbentuknya peraturan bupati untuk imbal jasa lingkungan air,” tambahnya.

Kegiatan-kegiatan AgFor yang sangat efektif dalam membantu pembangunan di Kabupaten Bantaeng adalah pelatihan pembuatan bibit unggul melalui pembibitan kelompok dan individu, pembuatan kompos dan pupuk organik, serta pelatihan untuk memasarkan hasil-hasil bibit unggulan tersebut. “Berbagai kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman juga dilakukan oleh tim AgFor, seperti riset ke desa yang menjadi daerah percontohan dan kemudian mengadakan studi banding ke daerah-daerah yang sukses. Tidak ketinggalan, kegiatan

sekolah lapang dengan mendatangkan tenaga ahli di bidangnya untuk berbagi ilmu secara langsung dan mempraktkannya. Semua kegiatan tim AgFor telah dalam proses untuk menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): mulai dari pengelolaan SDA yang berkelanjutan, konservasi air, penghijauan, dan manajemen tata kelola lahan secara agroforestri.” ungkap Bapak Syamsu Alam. ■



Ki-ka: James Roshetko, Syamsu Alam, Nurdin Abdullah, Pandam Prasetyo, Pratiknyo Purnomosidhi dalam diskusi pada tanggal 29 Agustus 2016 di Pantai Marina, Bantaeng. Foto oleh: ICRAF/Amy Lumban Gaol

Kerja Nyata AgFor di Desa Cikoro, Kabupaten Gowa

Penulis: Syamsuddin (Petani binaan AgFor)

Desa Cikoro yang terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, menyimpan banyak sumber daya alam dan hasil bumi khususnya dari sektor pertanian yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi para petani. Berbagai macam komoditas seperti kopi, cengkeh, coklat, markisa, nangka, hingga alpukat dapat tumbuh dengan baik di sini jika dipelihara dengan ketekunan dan ketelatenan para petaninya. Saya, Syamsuddin, adalah salah satu dari puluhan petani yang ada di Cikoro ini. Sektor pertanian ini merupakan sektor yang

sudah saya geluti sejak lama dan merupakan sumber mata pencaharian saya.

Sebagai mata pencaharian satu-satunya, sektor pertanian menjadi sektor yang penting untuk saya dan keluarga. Oleh karenanya, saya selalu mempunyai keinginan besar untuk dapat lebih mendalami dan meningkatkan pengetahuan saya pada bidang ini.

Sepanjang hidup saya di Desa Cikoro, saya hanya mampu menanam kopi saja di kebun. Dengan tujuan untuk mendapatkan hasil biji kopi sebanyak-banyaknya, saya

menanam kopi dengan jarak yang sangat rapat. Hasilnya tentu sangat jauh dari yang diharapkan. Biji kopi tersebut kecil-kecil, kualitasnya jelek, dan banyak yang berulat. Tidak mengetahui apa yang salah, saya tetap melakukan hal tersebut dan hanya bisa berdoa supaya hasilnya bisa berbeda, berubah jadi lebih baik.

Kondisi itu saya alami sampai kurang lebih Bulan April 2014. Saat itu merupakan waktu yang bisa dibilang cikal bakal saya dalam mempelajari lebih dalam tentang pertanian, yaitu saat AgFor masuk ke desa kami di Cikoro.

Tim AgFor Sulawesi pertama kali masuk ke desa dengan melakukan diskusi dan tukar pikiran mengenai keadaan lahan dan kondisi pertanian di Cikoro dan sekitarnya. Kami, para petani setempat, tidak secara langsung bersikap terbuka dan menyambut tawaran ini.

Akan tetapi, setelah beberapa pertemuan dan pelatihan langsung oleh tim AgFor, kami mulai terbuka dan menyambut arahan yang diberikan oleh tim, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan prioritas tanaman di desa kami yaitu antara lain: kopi, cengkeh, coklat, markisa, nangka, alpukat, dan lain-lain. Secara



Kegiatan pembuatan pupuk organik oleh Kelompok Samaturu Mandiri dan staf AgFor di kebun Bapak Syamsuddin. Foto oleh: ICRAF/Andi Prahmono

pribadi, saya sangat bersyukur mendapatkan pengetahuan mengenai sistem agroforestri/ kebun campur.

Sayangnya, berbagai pertemuan dan diskusi yang awalnya diikuti oleh kurang lebih 50 petani, termasuk saya, lama-kelamaan selalu berkurang, sampai hanya menjadi 1 orang saja, yaitu saya sendiri. Walaupun hanya sendirian, saya bersyukur tim AgFor tetap setia memberikan dampingan dan berbagi ilmunya.

Seiring berjalannya waktu dan berawal dari kesadaran bahwa saya tidak dapat melakukannya seorang diri, saya mulai mengumpulkan kembali teman-teman petani untuk dapat kembali hadir dalam pelatihan yang diadakan oleh tim AgFor. Kali ini, untuk mempermudah jarak tempuh bagi teman-teman petani lain untuk hadir di pelatihan di desa sebelumnya, yaitu Desa Palangkeke, saya berinisiatif untuk mengumpulkan kami dan tim AgFor di rumah saya.

Setelah beberapa bulan, kelompok belajar kami mulai bertambah menjadi 20 petani. Kami menamai kelompok tani kami menjadi Arabica AgFor. Keinginan yang kuat untuk mempraktekkan arahan-arahan dan informasi-informasi yang diberikan oleh tim AgFor mendorong saya dan teman-teman untuk memecah kelompok belajar kami ini menjadi beberapa kelompok tani kecil dengan fokus dan fungsi yang berbeda. Kelompok belajar kami tersebut pun akhirnya terpecah menjadi 11 kelompok tani yang menanganinya berbagai macam hal, mulai dari:

pupuk kompos, pupuk cair, pemetaan, agroforestri, racun, dan lain sebagainya.

Memasuki tahun 2016, kelompok tani kami boleh dibilang sudah mapan, berkat arahan dan bimbingan yang tak putus diberikan oleh AgFor kepada kami. Setelah menghasilkan bibit unggul berbagai komoditas, kami juga mendapatkan arahan lebih lanjut dalam hal pemasaran. Dengan tujuan memperluas pasar, kami mencoba ekspansi ke Makassar, Bontonompo, dan Takalar, untuk memasarkan pupuk organik, racun, buah, dan hasil bumi lainnya. Setelah mendapatkan respon positif dan minat beli yang tinggi dari berbagai pihak, dan atas masukan tim AgFor, kami kemudian bersepakat membangun suatu koperasi dengan tujuan untuk menampung, mengorganisir, dan memasarkan hasil tani kami. Koperasi "Samaturu Mandiri" (Samaturu Mandiri berarti berkumpul bersama dan berusaha secara mandiri) kini memiliki anggota tetap 29 petani dan anggota tidak tetap sebanyak 43 orang.

Pada awalnya saya pribadi tidak pernah berpikir untuk dapat mendirikan sebuah koperasi untuk hasil tani saya dan petani-petani di sini. Akan tetapi, berkat AgFor, hal yang awalnya terlihat tidak mungkin, akhirnya dapat terwujud. Bantuan AgFor tidak sampai di situ saja. Tim AgFor juga banyak membantu kami dalam hal pembinaan dan kelembagaan. Pelatihan yang semula hanya kami lakukan sebulan sekali, sekarang sudah berlangsung tiap minggu. Pelatihan-pelatihan ini juga tidak hanya dilakukan di

desa saja. Tim AgFor juga menambah wawasan dan meningkatkan ilmu kami dengan pelatihan di luar kota dengan memperlihatkan dan memberi studi banding untuk membuka mata kami terhadap kondisi di luar sana.

Banyak hal positif dan sangat bermanfaat yang kami terima dari tim AgFor: dimulai dari pola pikir kami yang sudah berubah. Misalnya pada mulanya kami berpikir bahwa untuk dapat menghasilkan sesuatu, kami membutuhkan dana yang besar. Namun, tim AgFor melatih kami untuk mengubah cara pikir seperti itu. Kami dilatih untuk dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan menggunakannya untuk kemudian menjadi sumber penghasilan. Contoh paling nyata adalah pupuk organik dan racun. Teknik agroforestri yang dibawa oleh tim AgFor yang sebelumnya tidak pernah kami tahu menjadi teknik yang sangat membantu kami dalam mengakali untuk bagaimana dalam satu lahan tidak hanya ditanami satu jenis tanaman, melainkan bisa hingga 3-4 jenis tanaman. Hal itu juga tentu saja sangat membantu meningkatkan mata pencaharian dan pendapatan kami.

Saya, secara pribadi, sangat berterima kasih kepada tim AgFor. Besar harapan saya supaya sesesainya AgFor dari sini, akan ada proyek agfor lainnya di seluruh Indonesia, sehingga lebih banyak lagi petani-petani dalam negeri yang mendapatkan manfaat dan mengalami perubahan kehidupan lebih baik seperti saya dan teman-teman petani di Cikoro. Terima kasih, AgFor! ■

AgFor dan Kontribusinya dalam Penyebaran Informasi dan Pengetahuan

Penulis: Ibrahim (Humas Pemda Kabupaten Jeneponto)

Hasil kerja tim AgFor (*Agroforestry and Forestry*) sudah tidak asing bagi penggerak pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pekerja pemerintah di provinsi ini, saya secara langsung melihat hasil kerjanya di lapangan, khususnya bagi para petani, penyuluh, dan petani penyuluh. Secara khusus di Kabupaten Jeneponto, tim AgFor telah membangun sinergi dengan masyarakat lokal, kelompok masyarakat, organisasi pelestarian lingkungan, universitas, dan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan petani melalui sistem agroforestri dan sistem pengelolaan sumber daya alam.

Kegiatan-kegiatannya bersama petani salah satunya ditujukan untuk membangun pedesaan melalui peningkatan mata pencaharian masyarakat (petani khususnya), manajemen tata kelola lahan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem agroforestri.

Agroforestri (kebun campur atau tumpangsari) merupakan penggabungan sistem pertanian dan kehutanan, dimana petani dapat menanam pohon dicampur dengan tanaman pangan dan hewan ternak. Ini adalah program yang sangat inovatif dan dapat dikatakan sebagai karya nyata tim AgFor karena manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, tim AgFor juga berupaya untuk dapat menyalurkan informasi dan pengetahuan seluas mungkin pada masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan kehutanan.

Selain berbagi ilmu dan pengalaman kepada petani, penyebaran informasi juga menjadi hal penting yang diajarkan oleh tim AgFor. Pada masa sekarang ini, gerakan Jurnalisme Warga untuk mengeskpos hasil kegiatannya di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan merupakan salah satu cara efektif penyebaran informasi.

Dalam kaitannya dengan komunikasi dan penyebaran informasi ini, tim AgFor juga menyelenggarakan pelatihan yang sangat penting, yaitu pelatihan menulis sebagai jurnalisme warga. Saya sebagai anggota Humas dan Protokol Kabupaten Jeneponto secara pribadi sangat merasa terbantu dalam melaksanakan tugas saya dengan diadakannya pelatihan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui unit Humas dan Protokol telah membangun sinergitas bersama masyarakat tani di Jeneponto. Kini, berbagai kegiatan di kabupaten ini lebih mudah dipublikasikan dan diinformasikan ke masyarakat umum dengan teknik-teknik



Para peserta kegiatan Bengkel Komunikasi IX menuangkan ide dan pendapatnya dalam blog pribadinya yang baru dimiliki dan dibuat saat pelatihan. Foto oleh ICRAF/Amy Lumban Gaol

dan cara-cara menulis yang telah saya dapatkan selama Pelatihan Jurnalisme Warga.

Tepatnya pada Bulan Juli 2016, tim AgFor mengundang saya, staf Humas dan Protokol, sebagai peserta Bengkel Komunikasi Jurnalisme Warga kerjasama dengan Yayasan BaKTI di Makassar. Kegiatan ini sangat faktual dalam merespon perkembangan teknologi informasi melalui media sosial, yang saat ini menjadi bagian media paling efektif dan efisien mempercepat informasi kepada masyarakat di Butta Turatea. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, di tengah masyarakat modern ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk dapat mengerti pentingnya media sosial dalam penyebaran informasi ke publik. Pelatihan ini menghadirkan narasumber yang juga merupakan ‘blogger’ dan sekaligus ‘mentor’ terkait teknik dan cara menulis, sangatlah membantu saya dalam pekerjaan saya yang bekerja di bidang Hubungan Kemasyarakatan (Humas).

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam upaya mendorong akselerasi pembangunan memiliki program penyebaran informasi melalui media sosial sangat efektif agar berita pembangunan cepat sampai di



Para peserta berfoto bersama setelah pelatihan Jurnalisme Warga selesai. Foto oleh: ICRAF/Christine Mailoa

masyarakat. Penyebarluasan informasi ini telah dilakukan melalui media sosial dan sebagai bagian dari upaya AgFor yang telah melatih staf humas pada kegiatan Bengkel Komunikasi Jurnalisme Warga. Bengkel Komunikasi yang diselenggarakan AgFor tersebut mempunyai tujuan agar ke depannya para peserta pelatihan dapat dengan baik memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga sudah sangat merasakan manfaatnya di dalam ranah kerja sehari-hari yang selalu bersentuhan dengan kepentingan publik di Kabupaten Jeneponto.

Kebutuhan masyarakat atas informasi yang baik dan edukatif sangatlah penting bagi kami. Seluruh masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Harapan kami dengan adanya keterampilan baru yang kami dapatkan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi yang mereka perlukan. Harapan besar kami di masa depan adalah dengan berakhirnya proyek AgFor di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan, kami masih dapat membawa AgFor ‘hidup’ di tengah masyarakat dengan terus memberikan informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan; misalnya bagi petani, kami dapat memberi tulisan tentang pengetahuan dan keterampilan dalam memelihara bibit atau tanaman, sehingga membuat mereka tertarik dengan artikel tersebut, yang tentu saja harapannya adalah kami dapat membantu mereka dengan tulisan tersebut, serasa masih ada kawan-kawan AgFor



Bapak Ibrahim dari Kabupaten Jeneponto saat diskusi dalam kegiatan pelatihan Bengkel Komunikasi IX “Saya Jurnalis Warga” di Kantor BaKTI, Makassar. Foto oleh: ICRAF/Christine Mailoa

yang membimbing mereka dengan pengetahuan dan keterampilan.

Kegiatan Jurnalisme Warga yang telah diperoleh juga sangat memberi kontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengelola informasi yang bernilai berita. Bukan hanya pengabdian bagi masyarakat, tetapi dengan adanya pelatihan ini meningkatkan kerjasama kami dengan kawan-kawan media. Kami dapat lebih giat dalam memberikan kontribusi dalam hal berita atau artikel ke media cetak ataupun ‘online’ dan ini telah diimplementasikan dalam bentuk rilis berita yang selanjutnya dikirim ke media cetak dan media sosial. Masih banyak lagi bantuan AgFor yang saya, sebagai anggota Humas dan Protokol Kabupaten Jeneponto, rasakan. Intinya AgFor sangatlah berperan besar dalam proses pembangunan Kabupaten Jeneponto, mulai dari masyarakatnya hingga kepada para stakeholders. Atas nama pmda Jeneponto, saya bisa mengatakan bahwa apresiasi tinggi patut diberikan pada tim AgFor karena AgFor adalah kerja nyata. ■

Dari Pupuk Kimia Beralih ke Pupuk Organik di Sulawesi Selatan

Penulis: Pratiknyo Purnomo Sidhi, Mulus Surgana, Asep Suryadi, Iskak Nungky Ismawan, Andi Prahmono

Ketika tim Agroforestry and Forestry (AgFor) Sulawesi mengawali kegiatannya tahun 2012 di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, mereka menjumpai bahwa para petani mempraktekkan penanaman secara monokultur dengan

menggunakan pupuk kimia. Alasan utama penggunaan pupuk kimia ini karena lebih mudah didapat di pasaran dan lebih cepat menunjukkan hasilnya.

Seiring dengan berjalannya kegiatan yang dilaksanakan di beberapa desa dalam dua

kabupaten tersebut, tim AgFor mengamati betapa sulitnya para petani mendapatkan pupuk urea di pasaran. Petani dapat membeli pupuk apabila memiliki surat rekomendasi dari kelompok tani atau penyuluh lapangan di suatu desa. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah



Pembuatan pupuk organik cair di kelompok belajar Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Loe 1, Desa Garing, Kabupaten Gowa. Foto oleh: ICRAF/Mulus Surgana



Kegiatan membuat pupuk cair di Desa Balang Pesoang. Foto oleh: ICRAF/Megawati

tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan lonjakan harga ketika musim tanam tiba. Kondisi tersebut menyebabkan pupuk majemuk NPK di pasaran menjadi pilihan alternatif.

Kejadian serupa juga ditemukan oleh Tim AgFor ketika memulai kegiatan di Kabupaten Jeneponto dan Gowa pada tahun 2014.

Tindakan aksi Tim AgFor

Tim AgFor mengamati bahwa sebenarnya, masyarakat petani Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Gowa, dan Jeneponto mempunyai potensi sebagai penghasil pupuk karena hampir setiap anggota kelompok mempunyai ternak kuda dan kambing. Akan tetapi kotoran kambing dan kuda yang dapat dimanfaatkan

sebagai bahan pupuk sama sekali belum tersentuh oleh masyarakat, karena ketidaktahuan mereka dalam pembuatan pupuk organik dan manfaatnya.

Melihat kondisi di keempat kabupaten ini, tim lapangan AgFor mencoba membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan pupuk melalui dua tahapan, yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat petani. Dalam memberikan pemahaman, tim AgFor menyampaikan bahwa mereka tidak perlu susah payah mencari dan membeli pupuk dengan harga mahal, karena sebenarnya pupuk yang terbaik sudah tersedia secara alami dari limbah ternak dan limbah sayuran yang ada di sekitar mereka. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan mengenai cara memanfaatkan limbah ternak dan limbah sayuran menjadi pupuk organik cair dan kompos sebagai pengganti pupuk kimia, membuat pupuk kandang secara terbuka dan tertutup.
- 2) Pembinaan untuk merawat ternak dan memanfaatkan kotorannya menjadi pupuk kandang.

Kedua tahapan tersebut tidak langsung diterima dan dijalani oleh masyarakat petani. Mereka menerapkan secara bertahap setelah melihat hasil dari petani lain.

Kisah Sukses Petani Pengguna Pupuk Organik di Sulawesi Selatan

Salah satu petani peserta pelatihan penggunaan pupuk organik yang diselenggarakan oleh tim AgFor adalah

Muhammad Halim dari Desa Rappolemba, Kabupaten Gowa. Selain mempelajari penggunaan pupuk organik, Muhammad Halim adalah anggota kelompok Sa'be Lawang di Desa Rapolemba juga mempelajari cara mengelola lahan, mengatur jarak tanam antar pohon, dan menerapkan sistem tumpangsari.

Sebelum mendapatkan pelatihan pembuatan dan pemakaian pupuk organik, Halim menggunakan pupuk kimia dan sempat merasa putus asa karena sering mengalami gagal panen. Pada awal tahun 2015, setelah mengalami gagal panen yang kesekian kalinya, beliau memutuskan untuk membat habis pohon di kebunnya dan menerapkan ilmu yang didapatnya dari pelatihan AgFor: sistem tumpangsari dengan jarak tanam khusus dan penyemprotan pupuk organik.

Pada lahan seluas ± 5 hektar, Halim, bersama kelompoknya, membuat pupuk cair organik dan mengaplikasikan pada tanaman labu siam (*Sechium edule*). "Setelah menggunakan pupuk organik saya mendapatkan hasil yang mencengangkan. Dalam satu tahun, saya mendapatkan dua kali masa panen," ujarnya. "Tambahan lagi, buah labu yang dihasilkan lebih besar dari sebelumnya, jumlahnya lebih banyak, dan rasanya lebih segar."

Di lain tempat, Syamsuddin, seorang anggota kelompok tani "Arabica AgFor" dari Desa Cikoro juga menyatakan hal serupa. Beliau telah merasakan sendiri manfaat penggunaan pupuk cair organik dan kompos di kebunnya.

Dengan niat ingin berbagi kesuksesannya, Syamsuddin memproduksi pupuk cair dan kompos lalu membagikannya ke sesama petani dan anggota kelompoknya. Beliau juga membuka rumahnya menjadi bilik informasi agroforestri untuk berbagi info-info pertanian terbaru. Setelah merasakan manfaat pupuk organik pada sistem agroforestri, Syamsuddin bersama anggota kelompoknya bersepakat membentuk koperasi untuk menjaga keberlangsungan produksi dan hasilnya.

Kini Syamsuddin menjadi salah satu pengurus Koperasi Sama Turu Mandiri yang rutin memproduksi pupuk organik dan menjualnya ke berbagai tempat. Salah satu pembelinya adalah staf Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa yang selalu memesan ± 200 liter dan kompos 150 karung. Sejak memproduksi pupuk organik bersama tim AgFor, Syamsuddin sudah tiga kali melakukan penjualannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui mantan kepala dinasya. Walaupun pemesanan tidak dilakukan secara rutin setiap bulannya oleh dinas terkait atau pun perwakilan pemerintah lainnya, tapi permintaan pasar selalu ada. Misalnya oleh sesama petani di dalam maupun di luar desa.

Harga jual pupuk cair dan kompos adalah Rp10.000,00 setiap liter atau karung. Menurut staf Dinas Kehutanan Gowa, pupuk cair dan kompos yang diproduksi oleh Syamsuddin sangat bagus terlihat dari respon tanaman yang lebih segar.



Kegiatan monitoring yang dilakukan seminggu setelah proses pembuatan pupuk cair dimulai. Foto oleh: ICRAF/Megawati

Para petani ini berharap agar ke depannya pemasaran pupuk organik bisa membantu meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, hal ini diharapkan bisa mendorong petani, khususnya di Kelurahan Cikoro, dan Sulawesi Selatan umumnya untuk lebih mengembangkan sistem

pertanian organik, baik melalui penggunaan pupuk organik maupun pestisida alami. Sebagai contoh, saat ini hasil limbah pengelolaan kopi sudah mulai disimpan oleh para petani untuk diproduksi lebih lanjut menjadi pupuk kompos sehingga memberikan manfaat. ■



Kisah Sukses dari Sulawesi Tenggara

- 16** Agroforestri untuk Penghijauan di Desa Awua Jaya
- 19** Kesepakatan Komoditi Pohon: Awal Perjanjian untuk Melestarikan Tahura Nipa-Nipa
- 21** Menggemakan Semangat Agroforestri dari Sulawesi Tenggara sampai ke Aceh
- 24** Rumah Kompos Organik Desa Aunupe: Mengubah Sampah Pertanian Menjadi Uang
- 27** Meluasnya Pasaran Madu MPU Konawehea
- 30** Meretas Jalan Kolaborasi Pengelolaan Hutan di Kawasan Konservasi: Pengalaman dari Tahura Nipa-Nipa
- 33** Berbagi Ilmu, Memperbaiki Hidup – Pengalaman Petani Penyuluh AgFor dari Desa Lawonua

Agroforestri untuk Penghijauan di Desa Awua Jaya

Penulis: Hendra Gunawan

Desa Awua Jaya, yang terletak di Kecamatan Asinua merupakan suatu daerah yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang buruk dan kondisi alam yang kering. Kondisi ini berpengaruh pada jangkauan media informasi, baik cetak maupun elektronik, kepada masyarakat di sana yang sebagian besar merupakan kaum tani transmigran dari Jawa Timur yang tidak bisa

lagi bertani karena kondisi tempat tinggal dan mata pencahariannya yang hancur setelah erupsi Gunung Kelud tahun 2010.

Salah satu petani transmigran itu adalah Wahyudin (42 tahun) dari Madiun, Jawa Timur. Dengan hanya berlatarbelakang lulusan SMP, beliau bertekad untuk memberi kehidupan yang baru pada keluarganya di tanah Sulawesi.

Selain sebagai seorang petani yang tidak ragu bekerja keras untuk menghijaukan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, Wahyudin juga merupakan seorang ustaz di desanya. Beliau sangat berharap bisa mendapatkan pelatihan tentang hasil hutan bukan kayu serta dan menyejahterakan masyarakat melalui kelestarian alam dan sumber air terutama daerah dataran rendah di sekitar



Tahun 2012: gersangnya kondisi lahan sebelum AgFor memulai kegiatannya. Foto oleh: ICRAF/Hendra Gunawan



Tahun 2016, Kondisi Belakang masjid Pasca AgFor. Foto oleh: ICRAF/Hendra Gunawan

Aabuki, Unaaha, Kota Kendari, dan sekitarnya.

Bersama beberapa petani lainnya di Desa Awua Jaya, Wahyudin menggarap tanah demi menghijaukan dataran kering meskipun daerah itu sudah dikenal susah untuk menanam jenis tanaman penayang karena selalu mati sebelum bisa berkembang.

Menjelang akhir tahun 2013, tim AgFor memulai kegiatannya di Desa Awua Jaya. Sebagai suatu proyek yang bertujuan untuk mencerdaskan para petani dan menjadi wadah belajar, kegiatan tim AgFor mendapat sambutan hangat dari warga desa. Bersama masyarakat, tim AgFor bekerjasama

dan meningkatkan hasil produksi, sehingga kelompok petani dapat meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonominya. Sebagai contoh, karet yang selalu menjadi komoditas utama petani Awua Jaya kini hanya menjadi salah satu komoditas unggulannya. Saat memulai kegiatan proyeknya, pengetahuan para petani sangat terbatas mengenai agroforestri/kebun campur atau pun komoditas selain karet. Misalnya lada, cengkeh, durian, dan sebagainya. Untuk memastikan adanya keberlangsungan hasil produksi, tim AgFor memberikan banyak pelatihan dan informasi melalui demoplot dan bertanam secara tumpangsari, yaitu: sengon-merica-karet, jahe-karet, dan karet-nilam.

Tahun 2014, berkat semangat tinggi akan penghijauan yang selalu ditunjukkannya kepada warga, Badan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) dan tim AgFor mengangkat Wahyudin menjadi petani penyuluh untuk memberikan pembelajaran dan motivasi kepada warganya dalam berkebun.

Konsep awal pembelajaran yang dilakukan adalah berbagi info dari petani ke petani. Dalam berbagai kesempatan dan kegiatan, Wahyudin memberikan penjelasan bagaimana beliau memanfaatkan halaman belakang pekarangannya, kurang lebih sekitar 1 ha, dan membuat pendapatan harian,

mingguan, bahkan bulanan serta tahunan melalui praktik agroforestri/kebun campur.

Kegiatan harian beliau adalah memelihara bebek dan ayam, lalu menjual telurnya, memberi makan ikan dan ternak lainnya, menanam sayur dan buah-buahan, serta menumbuhkan padi. Dalam suatu pelatihan, Wahyudin menuturkan, "Siapapun bisa memandirikan dirinya dari pertanian". Adanya daya sosial sebagai petani bahkan memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan hasil/upah dari penjualan telurnya dengan cara memelihara bebek dan ayam.

Selain bertani, Wahyudin juga mengajak warga Awua Jaya untuk berternak kambing dan memanfaatkan kotorannya sebagai pupuk kompos, yang nantinya juga bisa menambah insentif hasil dan pendapatan, karena kompos sudah terbukti bisa menyuburkan tanah dan menghemat skala ekonomi rendah dalam hal pengeluaran untuk pupuk tanaman kebun pekarangan rumah yang belum berproduksi.

Pihak pemerintah dalam hal ini, Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP), secara rutin memantau Kelompok Tani Hutan (KTH) asuhan Pak Wahyudin. Hasil pantauan menunjukkan bahwa para anggota kelompok sudah memahami dan terbukti bisa menjadi penghubung antar petani di desa lain (Nekudu, Lasada, Awuasari,

dll). Pak Wahyudin dan anggota KTHnya kini menjadi penggerak masyarakat dalam mengelola pertanian, kebun, dan hutan, serta menciptakan tanaman sebagai tabungan untuk masa depan. Dengan bantuan teknologi baru dari BP3K, KTH ini kini menjadi lembaga yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

Perekonomian masyarakat tani kelompok transmigran ini secara perlahan tapi pasti mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah petani binaan AgFor yang membangun dan memperbaiki rumahnya. Pemberdayaan pengetahuan disertai tindakan memperlihatkan bahwa komoditi unggulan ternyata dapat meningkatkan ekonomi.

Kehadiran tim AgFor telah memberikan bimbingan pada para petani sehingga memberikan gambaran jelas mengenai cara menjaga dan mengembangkan hasil tani untuk jangka waktu yang panjang.

Selain bekerja bersama petani di lapangan, Wahyudin juga menunjukkan semangatnya untuk mendukung program kerja pemerintah setempat dalam memperbaiki sistem penyuluhan. Selama tiga bulan, beliau datang dan hadir di kantor BP3K dan memberi pencerahan bagi para petugas penyuluh dan petani.

Salah satu dampak positif kehadiran Wahyudin di kantor BP3K adalah meningkatnya aktifitas penyuluhan para

petugas serta peran serta aktif BP3K dalam memfasilitasi Pusat Informasi Agroforestri bersama tim AgFor dengan memberdayakan pembibitan dalam rangka menumbuhkan minat petani.

Kini Desa Awua Jaya menjadi contoh dan teladan bagi semua desa tetangga untuk memperbaiki lahan di sekitarnya dan menjadi penyedia bahan baku sehingga menarik banyak pembeli yang mengharapkan komoditi unggulan karet yang tumbuh dan berkembang dengan baik.

Secara umum, hijaunya lokasi di Desa Awua Jaya sekarang berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2011 saat AgFor masuk pertama kalinya. Saat ini, kondisi lahan di sekitar rumah warga telah rimbun dan menjadi hijau dengan adanya berbagai tanaman hasil kelompok binaan. Sekarang sebagian besar warga desa ini sudah bisa menumbuhkan tanaman palawija dan merica di bawah naungan tanaman apapun.

Tahun ini (2016), pihak penyuluh BP4KKP bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti Demplot Agroforestri di kebun petani binaan AgFor dengan membagikan bibit jahe. Diharapkan kedepannya Desa Awua Jaya bisa menghasilkan dan menjual berbagai bibit dan menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menumbuhkan semangat para petani untuk memberdayakan lahan. ■

Kesepakatan Komoditi Pohon: Awal Perjanjian untuk Melestarikan TAHURA Nipa-Nipa

Oleh Jhon Roy Sirait dan Hendra Gunawan

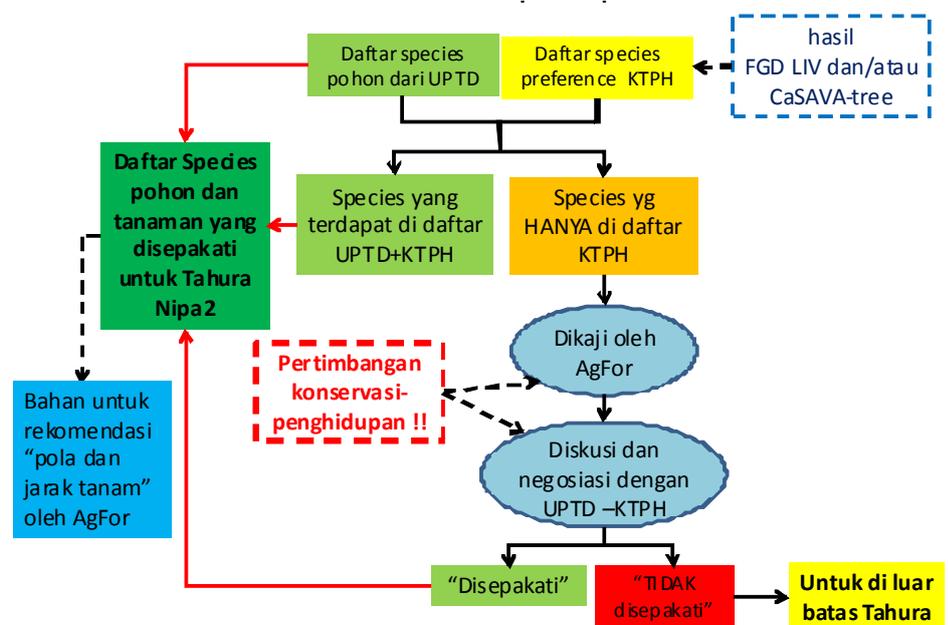
Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa merupakan suatu kawasan hutan dengan luas 7.877,5 ha yang berfungsi sebagai area konservasi tanaman dan hewan endemik maupun eksotis. Selain itu, Tahura Nipa-Nipa juga berfungsi sebagai lokasi penelitian, pendidikan, pengetahuan, budaya, wisata alam, dan juga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi warga sekitarnya.

Untuk mengatur pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi ini dan mencegah terjadinya konflik, seluruh Kawasan Tahura dibagi dalam 4 blok, yaitu: blok perlindungan 3.319,2 ha, blok pemanfaatan 3.147,5 ha, blok koleksi tanaman 699,5 ha dan blok lainnya sekitar 711,3 ha. Blok seluas 711,3 ha ini merupakan blok khusus di Tahura Nipa-Nipa yang terbuka untuk pengelolaan oleh masyarakat melalui Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH). Berbagai upaya dan kegiatan dikhususkan pada pemanfaatan blok ini supaya pengelolaannya berbasis agroforestri sehingga dapat membawa dua fungsi: memberi penghidupan bagi warganya sekaligus konservasi dan keberlanjutan terhadap taman hutan raya.

Penanaman pohon di Kawasan Tahura ini seringkali menimbulkan konflik antara petani dengan pengelola kawasan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara petani yang menginginkan tanaman bernilai ekonomis tinggi dan pengelola kawasan yang menginginkan tutupan tajuk semakin meningkat. Sehingga perlu ada jenis-jenis tanaman yang dapat menengahi kepentingan dua pihak tersebut.

Untuk menengahi komoditi pohon yang perlu ditanam

oleh kelompok tani di lahan kelolanya, melalui LCS (*Livelihood Conservation Strategy*/Strategi Penghidupan dan Konservasi) yang dibangun tim Pokja (Kelompok kerja) pada tahun 2014 yang difasilitasi oleh tim AgFor Sulawesi. Personil Tim Pokja Agfor terdiri dari pemangku kepentingan langsung dengan Tahura Nipa-nipa, seperti Kelompok Tani Pelestari Hutan, UPTD BP (Balai Pengelola) Tahura Nipa-Nipa, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari, LSM lokal Teras dan Agfor Sulawesi. Salah satu strategi yang dibangun oleh



Kerangka Kerja negosiasi untuk menyepakati pohon di Lokasi Tahura Nipa-Nipa.



Pengukuran pohon yang disepakati di Tahura Nipa-Nipa. Foto oleh: ICRAF/Jhon Roy Sirait

tim Pokja adalah melakukan negosiasi dan memfasilitasi diskusi untuk mendapatkan kesepakatan pohon apa saja yang diperbolehkan ditanam di kawasan Tahura Nipa-Nipa antara pihak UPTD BP Tahura Nipa-Nipa sebagai pengelola kawasan hutan dan Kelompok Tani Pelestari hutan sebagai pengelola lahan.

Langkah-langkah yang dibangun adalah melalui FGD (*Focus Group Discussion*)



Bapak Joka (KTPH Tumbuh Subur) sedang mengidentifikasi pohon yang ada di kebunnya. Foto oleh: ICRAF/Jhon Roy Sirait

dan pertemuan formal, baik di kelompok tani maupun pihak UPTD BP Tahura Nipa-nipa. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan mempertemukan kedua belah pihak yang akan menyepakati pohon yang akan ditanam dan dikelola di dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.

Sebelum mencapai kesepakatan mengenai pohon yang akan ditanam, tim pokja sudah mempunyai daftar pohon yang boleh ditanam di lokasi blok khusus, sesuai surat No. 424/28/BTNN/2014 dari kepala UPTD BP Tahura Nipa-Nipa tentang jenis-jenis tanaman yang diperbolehkan di Blok Khusus Tahura Nipa-Nipa.

Tujuan dari negosiasi penentuan jenis pohon ini adalah untuk menghindari adanya perbedaan persepsi tentang pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa melalui agroforestri dan hutan yang berkelanjutan karena selama ini pihak pengelola belum pernah mendapatkan masukan dari KTPH tentang pohon yang diperbolehkan ditanam dan yang tidak diperbolehkan. Membangun rasa nyaman dan aman merupakan mimpi pihak KTPH dan UPTD BP Tahura Nipa-Nipa melalui kerjasama dan rasa saling memiliki demi konservasi taman hutan raya ini.

Bulan Juli 2016, ibarat gayung bersambut pihak UPTD menindaklanjuti hasil negosiasi dalam bentuk Pergub (Peraturan Gubernur) yang ditindaklanjuti juga dengan adanya MoU kesepakatan antara KTPH Subur Makmur Kelurahan Watuwatu dengan UPTD Tahura Nipa-Nipa

yang dilakukan di lokasi lahan yang dikelola, dimana didalamnya tertuang adanya tanaman yang berbuah dan berkayu yang jarak tanamnya diatur, sehingga bisa menutupi permukaan tanah, bahkan anakan pepohonan yang ada dalam kebun harus dipelihara, semua itu tertuang dalam rencana kelola KTPH yang dibuat secara kolaboratif.

Dengan adanya proses kesepakatan pohon ini, ada beberapa poin yang menjadi harapan bersama berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Adanya pembelajaran yang didapat dalam membangun kerjasama suatu kelompok atau lembaga dalam hal ini UPTD tahura Nipa-Nipa dan KTPH untuk membuat suatu kesepakatan yang partisipatif dan inklusif terutama untuk menyepakati pohon yang bisa di tanam di kawasan konservasi Tahura Nipa-Nipa.
2. UPTD BP Tahura Nipa-Nipa dapat mengembangkan dan memberdayakan blok khusus di kawasan Tahura Nipa-Nipa secara maksimal dengan berkolaborasi bersama KTPH atau pemangku kepentingan lainnya.
3. Adanya model pengelolaan tanaman pohon-pohonan atau manajemen kelola kebun dengan tanaman buah yang bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi dan konservasi untuk kawasan hutan itu sendiri.
4. Adanya jenis pohon baru yang muncul dan selama ini diminati kelompok tani tetapi belum terakomodasi dalam daftar tanaman yang diperbolehkan oleh UPTD BP Tahura Nipa-Nipa. ■

Menggemakan Semangat Agroforestri dari Sulawesi Tenggara sampai ke Aceh

Mahrizal, Hendra Gunawan, Heru Maulana, Gusti Kusuma

Budi daya kakao di Aceh awalnya dilakukan dalam skala luas melalui proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Tanaman Ekspor (PRPTE) pada tahun 1980-an. Masa keemasan produksi kakao di Aceh terjadi pada masa 1990-an. Namun sejak eskalasi konflik bersenjata melanda Aceh meningkat dari akhir tahun 1990-an sampai 2004, produksi kakao terus menurun. Para petani tidak bisa ke kebun untuk merawat tanaman dengan alasan keselamatan, sehingga banyak kebun kakao tidak terawat, terserang hama penyakit dan umur tanaman yang semakin menua. Hal tersebut membuat kakao Aceh di kategorikan sebagai “hutan kakao”. Berbagai program dari pemerintah dan LSM seperti Program Gernas Kakao, program dari Multi Donor belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan di bidang kakao di Aceh.

Beda halnya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), walaupun sama-sama mengembangkan kakao melalui proyek PRPTE, Program Gernas Kakao, dan program lainnya, konflik bersenjata tidak di alami oleh penduduk Sultra. Penerapan berbagai program mendapat sambutan yang luas di masyarakat. Keberhasilan program Gernas dan program

lainnya seperti rehabilitasi tanaman melalui sambung samping, pengendalian hama penyakit yang efektif, keberadaan kelembagaan petani, pemasaran, serta penerapan budi daya kakao dengan pola agroforestri menjadi alasan para petani Aceh memutuskan untuk belajar dari para petani dan para pihak di Sulawesi Tenggara.

Kunjungan Petani Pidie ke LEM Sejahtera dan Kebun Kakao Rakyat di Kolaka Timur

Ide untuk mengadakan kunjungan petani kakao ini berawal saat berlangsungnya lokakarya nasional Hari Kakao Indonesia di Yogyakarta, September 2015. Diskusi informal antara tim AgFor Sulawesi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie, Aceh membahas kemungkinan untuk berbagi ilmu melalui suatu kunjungan lapang petani ke daerah penghasil kakao di Sulawesi Tenggara.

Kunjungan lapang tersebut akhirnya terlaksana pada tanggal 9-14 Agustus 2016 dengan fasilitasi dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhort) Provinsi Sulawesi Tenggara, AgFor Sulawesi (ICRAF dan OWT), Dinas Perkebunan dan Hortikultura



Para petani dari Pidie, Aceh mendengarkan Bapak Nyoman Noster, pemilik kebun campur kakao-lada, berbagi pengalamannya dalam mempraktekkan ilmu yang didapat dari tim AgFor. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Kabupaten Kolaka Timur, dan BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) Kabupaten Kolaka Timur, serta LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat) Sejahtera Kecamatan Lambandia.

Dengan agenda untuk melihat secara langsung proses budi daya kakao baik secara monokultur dan agroforestri, pascaproduksi, kelembagaan petani; kunjungan tersebut diharapkan dapat memotivasi sekaligus menjadikan petani dari Pidie sebagai ‘agen’ berbagi pengetahuan kepada petani lainnya di Aceh.

Kegiatan kunjungan ini diikuti oleh 26 peserta dari Pidie: 11 diantaranya adalah petani dan sisanya tenaga penyuluh

dan pendamping dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Pidie. Dalam sambutannya (10/8) di Kendari, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Bambang, MM, menyampaikan potensi kakao, keberadaan lembaga petani (LEM Sejahtera) serta tantangan/penyebab turunnya hasil produksi karena akibat hama, penyakit, dan faktor usia tanaman, kurangnya perawatan, serta rendahnya kepercayaan petani terhadap petugas penyuluh. Beliau juga mengatakan, "Salah satu kunci untuk meningkatkan pendapatan petani kakao adalah melalui penguatan kelembagaan yang merupakan wadah pemersatu dalam membangun semangat kebersamaan petani."

Pada kunjungan ini, para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok kecil, yaitu: (1) ke Desa Bou untuk belajar tentang budi daya kakao dan kesehatan tanah, (2) ke Desa Penangoosi untuk belajar budi daya dan sambung samping kakao, dan (3) ke Desa Tinete untuk belajar tentang kelembagaan petani.



Sambutan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)



Pembagian materi publikasi AgFor sebagai kenang-kenangan kepada para petani dari Pidie, Aceh, saat kunjungan ke lokasi kerja proyek AgFor di Sulawesi Tenggara bulan September 2016. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Pembelajaran mengenai budi daya kakao di Desa Bou berlangsung di kebun H. Darman, seorang petani kakao yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan harapan dapat membantu meningkatkan semangat para peserta kembali menanam kakao, H. Darman menuturkan pengalamannya.

Beliau berkisah bahwa pada tahun 2012, masyarakat Desa Bou sudah putus asa dengan rendahnya hasil produksi kakao sebagai akibat dari serangan hama dan penyakit serta menurunnya kesuburan tanah. Sebagian besar masyarakat bahkan sudah beralih ke komoditas lain. Situasi berubah sedikit demi sedikit saat LEM Sejahtera dan AgFor memberikan banyak pelatihan dan penyuluhan. "Awalnya memang sangat sulit untuk membangun kembali ketertarikan masyarakat untuk belajar," ungkapnya. "Namun tidak ada yang lebih susah dikerjakan kecuali: membangunkan orang yang tidak tidur, membuat orang yang tidak tuli mendengar, dan membuka mata orang yang tidak buta."

Kebun Agroforest Kakao – Lada dan Pembibitan

Kegiatan kemudian dilakukan dengan mengunjungi kebun kakao agroforest dan pembibitan lada yang memberi warna baru tentang pemahaman budi daya kakao dan potensi komoditas lada bagi para peserta kunjungan. Dalam sambutannya di hari pertama kegiatan kunjungan ini, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kolaka Timur, Dr. Ir. Idarwati, MM, mengatakan, “Ambillah sebanyak mungkin ilmu dari sini dan terapkan kemudian di daerahnya masing-masing.”

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan ke pembibitan lada yang didanai oleh Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Tasehea, salah satu desa binaan AgFor. “Dalam prosesnya, pembuatan bibit lada unggul satu ruas berdaun tunggal ini awalnya dilakukan oleh tim AgFor hanya pada kelompok tani binaan, tapi kemudian

direplikasi oleh masyarakat Desa Tasehea karena bibit lada yang dihasilkan merupakan bibit unggul dan dapat dimanfaatkan langsung untuk kebun sendiri dan dijual oleh warga,” ujar Made Lomiana (Ketua BPD dan Penyuluh).

Salah satu demoplot kebun agroforest kakao-merica berbasis agroforestri hasil binaan AgFor menjadi tempat belajar para peserta melalui diskusi dengan pemilik kebun dan tim AgFor terkait budi daya tanaman kakao-merica, manfaat dari kombinasi tanaman, pemupukan dengan pupuk organik bokashi berbahan kotoran ternak dan limbah sekitar yang difermentasi oleh petani sendiri, pestisida nabati, serta hasil yang didapatkan dari kebun tersebut. Secara khusus, para peserta dari Pidie juga belajar mempraktekkan cara pengambilan bibit lada serta teknis penanamannya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie, Ir. Syarkawi, di akhir



Kunjungan di kebun campur kakao-lada di Kolaka Timur. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

kegiatan mengatakan, “Atas nama semua peserta dari Pidie, saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Walau pun terbilang singkat, kami mendapatkan banyak sekali ilmu dan manfaat dalam kunjungan ini. Sebagai penanggungjawab kegiatan, saya akan melaporkan semuanya ke Bupati Pidie dengan harapan setiap hasil pembelajaran dari sini dapat menjadi bagian dari program baru Dinas Perkebunan dan Pemerintah Pidie. Harapannya, tanaman kakao yang sudah lama ditinggalkan di Aceh dapat hidup kembali dengan penambahan hasil produksi melalui pembuatan pembibitan lada dan praktik sambung samping budi daya kakao secara agroforestri, khususnya dengan lada.”

Di penghujung kegiatan, tim AgFor Sulawesi membagikan buku teknis Budi Daya Lada, Budi Daya Kakao di Kebun Campur, Budi Daya Kopi, Budi Daya Jeruk, dan beberapa cenderamata kepada para petani dan staf Dishutbun Pidie, Aceh untuk dijadikan panduan saat melakukan budi daya tanaman di kebun campur. ■



Foto bersama dengan Petani dan Dishutbun Pidie. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Rumah Kompos Organik Desa Aunupe: Mengubah Sampah Pertanian Menjadi Uang

Penulis: Hendra Gunawan

Sejuknya udara dingin pagi itu kian terasa ketika saya berjalan di sepanjang jalur Andolo, Konawe Selatan—Kendari, tepatnya di Kecamatan Wolasi, yang memotong Hutan Lindung Papalia. Saat melewati gerbang Desa Aunupe, terdapat jalan yang mengarah pada rimbunnya kebun campur yang siap panen berupa merica, jeruk, dan karet

yang ditumpangsarikan dengan tanaman sayuran.

Berdasarkan data monografi desa, Desa Aunupe, yang terletak di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan ini berpenduduk sekitar 430 jiwa yang sebagian besar penduduknya hidup berladang, bertani, tukang kayu dan tukang batu. Seluas 155 ha lahannya merupakan area

perkebunan, persawahan 50 ha, pemukiman 2,5 ha, dan pekarangan 5 ha. Komoditi perkebunannya berupa jeruk, kakao, dan merica. Komoditi pertanian andalannya berupa padi sawah, padi ladang, sayuran, dan palawija; sedangkan di sektor kehutanan, masyarakatnya menanam aneka pepohonan seperti *Gmelina*, *Jabon*, *Jati*, dan *Sengon*. Salah satu



Lokasi kebun campur merica dan sayuran organik milik Bapak Maskuri di Desa Aunupe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

tantangan yang dialami oleh para petani yang sekaligus menjadi potensi di Desa Aunupe adalah bercocok tanam secara tradisional yang bersifat konvensional dan turun temurun. Sampai saat ini masih banyak petani yang menggunakan berbagai pupuk dan obat kimia dalam sistem taninya.

Maskuri, 38 tahun, salah seorang petani Desa Aunupe yang berasal dari Jawa Tengah, memulai kegiatan taninya sejak tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai tanaman komoditi telah ia upayakan di kebunnya dan seringnya kegagalan yang dialami, tidak membuatnya patah semangat untuk mencoba lagi dan lagi, sampai menjadi petani yang sukses. Tahun 2012, beliau bergabung dalam suatu kegiatan pelatihan AgFor mengenai teknik sambung samping dan pemangkasan. Dengan mengikuti berbagai kegiatan selanjutnya, pengetahuan

Maskuri akan sistem tani semakin bertambah. Ia melihat semakin langka dan susahny mendapatkan pupuk sehingga banyak hama yang menyerang kebun, walaupun terkadang sudah dilakukan penyemprotan racun dan pupuk kimia di lahan para petani. Setelah mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk organik dari AgFor, beliau mulai menerapkan penggunaan pupuk hijau alami itu di kebunnya dan mengajak para petani lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Semakin bertambahnya kebutuhan akan pupuk organik menimbulkan ide untuk membuat rumah kompos sebagai tempat penyimpanan. Pada suatu kesempatan diskusi kelompok tani, bersama kepala desa dan tim AgFor, ia menjelaskan pentingnya survei pemetaan lokasi kebun organik yang melibatkan warga dan dukungan dari LSM lokal dalam mendampingi proses organik. Di akhir



Foto bersama beberapa perempuan anggota kelompok tani organik. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)



Wawancara padi ladang organik oleh staf ICRAF. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)



Rumah kompos kemitraan BI-AgFor-BP4K. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

diskusi, didapat kesimpulan kesediaan warga Desa Aunupe untuk menjadi warga desa organik. "Kami bersedia untuk berswadaya mewujudkan masyarakat pertanian organik secara bertahap bahkan dalam tahap persiapan lahan,"kata Lukman, Kepala Desa Aunupe.

Semangat tinggi Maskuri menjadikan beliau sebagai salah satu petani teladan binaan AgFor dan mengarahkan para petani di Desa Aunupe untuk menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati dengan



Diskusi penguatan organik bersama Kepala Desa Aunupe, Bapak Lukman. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

cara memanfaatkan potensi yang ada serta mendaur ulang sampah kebunnya. Dalam melakukan upaya kerasnya ini, beliau mendapat dukungan dari tim AgFor yang memberikan informasi teknologi terbaru dalam pertanian serta pelatihan untuk membuat Rumah Kompos Organik di beberapa lokasi desa.

Kerja keras selama bertahun-tahun untuk Rumah Kompos Organik kini mulai menunjukkan hasil dan

manfaat nyata. "Saat ini kami bisa menjual pupuk organik, hasil pelatihan tim AgFor, seharga Rp20.000,00 per karungnya. Memang tidak semua petani di kampung ini memakai pupuk organik, tapi kondisi ini merupakan kemajuan luar biasa," ujar Maskuri. "Biasanya saat panen sawi, kacang, terong, lombok, dan pare, bisa kami jual ke para pembeli yang langsung datang ke kebun kami. Hasil penjualan bisa mencapai Rp2.000.000,00, dengan harga satu ikat sayuran rata-rata Rp1.000,00-Rp2.000,00. Rumah kompos ini sungguh menguntungkan kami, kaum tani di Desa Aunupe."

Gerakan untuk menjadikan Desa Aunupe sebagai desa organik mendapat sambutan hangat dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah desa, kecamatan, bahkan provinsi menyambut positif rencana masyarakat Desa Aunupe, khususnya KPH Gularaya, untuk bertani secara organik. Dukungan ini



Penandatanganan berita acara para pihak pertemuan kemitraan dalam penyusunan master plan. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

tentunya sangat penting dalam menindaklanjuti kiprah petani organik serta menjadi landasan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui Pilot Proyek Kluster.

Diskusi untuk menjadi mitra dan bekerjasama dengan Bappeda dan BI tersebut digagas pada saat pertemuan di Kantor Bappeda Kabupaten Konawe Selatan tanggal 2 November 2015, yang membahas tentang Perkembangan dan Strategi Pascaproyek AgFor. Saat ini, para pihak yang berkepentingan sudah menyepakati untuk saling bahu-membahu menjadikan Desa Aunupe sebagai cahaya yang menerangi pengembangan agroforestri dan kehutanan di Kabupaten Konawe Selatan. Musrenbang kabupaten telah memasukkan pengembangan pertanian organik di Desa Aunupe sebagai salah satu rekomendasi rencana kerja yang perlu dilakukan dan menjadi bagian rancangan dokumen master plan serta susunan kemitraan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 Kabupaten Konawe Selatan melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. ■



Survei lokasi organik di Desa Aunupe. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Meluasnya Pasaran Madu MPU Konawe

Penulis: Mahrizal dan La Ode Ali Said

Pasaran madu hasil produksi Koperasi Mepokoaso Pasoema Uluiwoi (MPU) yang selama ini terbatas kini meluas, dan bahkan merambah pasar internasional, khususnya Malaysia. Pada tahap awal, penjualan perdana Madu MPU di negeri jiran ini mencapai 35 botol berukuran 600 ml. Hal ini menandakan langkah awal yang mulus dalam memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional.

Rasa madu hutan murni hasil panen madu lestari ini berbeda dengan madu dari daerah lain. Menurut Ali, seorang pembeli dari Malaysia yang juga menjual madu, mengatakan, "Dari segi rasa, Madu MPU ini lebih manis dibandingkan dengan beberapa madu impor lainnya. Hal yang senada juga diungkapkan Muammar, seorang WNI yang menetap di Malaysia, "Rasa Madu MPU ini betul-betul enak dan menyegarkan."

Kecamatan Uluiwoi dengan Kota Unaaha. Begitu pentingnya kedudukan sungai ini sehingga membuat anggota masyarakat bersepakat untuk melekatkannya pada label Madu MPU sebagai identitas asal madu.

Mencari madu bagi warga Kecamatan Uluiwoi merupakan pekerjaan alternatif yang bisa menghasilkan tambahan pendapatan yang signifikan saat musim kemarau. Meskipun pada umumnya mata pencaharian utama masyarakat setempat bertani kakao, palawija, dan tanaman hortikultura, kegiatan mencari madu hutan sudah menjadi rutinitas mereka setiap kali musim panen madu hutan tiba, khususnya di saat musim kemarau.

Menurut Iskandar, Kepala Desa Tawanga, kegiatan mencari madu hutan merupakan rutinitas yang sudah dilakukan nenek moyang mereka secara turun-temurun. "Sebelum para petani madu hutan (*pasoema*) menjadikannya sebagai salah satu produk yang diperjualbelikan, madu hutan hanya dikonsumsi sebagai obat; sementara sarangnya diambil untuk dijadikan lilin dan penambal perahu yang bocor karena pada saat itu perahu adalah alat transportasi penting masyarakat untuk membawa hasil bumi ke ibukota kabupaten." ujarnya.

Mempertahankan Tradisi dan Memunculkan Identitas Lokal

Madu hutan MPU ini berasal dari lebah "*Apis dorsata*" dan diproduksi di hulu sungai Konawe, tepatnya di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara atau sekitar 4-5 jam perjalanan darat dari Kota Kendari. Bagi masyarakat Uluiwoi, Sungai Konawe, yang melintasi empat kabupaten/kota (Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kota Kendari) ini sangat banyak dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari, antara lain: sebagai sumber air minum, mandi dan mencuci, memenuhi kebutuhan pengairan irigasi, bahkan sungai ini juga digunakan sebagai jalur transportasi air yang menghubungkan



Salah satu *pasoema* (petani madu) menunjukkan sarang lebah yang nantinya akan diolah menjadi madu hutan. Foto oleh: ICRAF/Christine Mailoa

Kegiatan Produksi madu dan Pemasaran oleh Koperasi MPU

Perubahan sikap dan pola pikir pasoema dalam pengelolaan madu hutan secara lestari higienis dan berkelanjutan menginspirasi kelompok-kelompok kecil pasoema akan perlunya suatu komunitas atau kelembagaan sebagai wahana yang mengatur tata niaga madu karena selama ini semuanya dikendalikan oleh tengkulak.

Setelah melalui berbagai diskusi dan kesepakatan, dibentuklah Koperasi MPU

yang dikukuhkan pada tanggal 27 Mei 2015 dengan inisiasi dari empat desa di Kecamatan Uluiwoi yaitu Tawanga, Undolo, Lalombai, dan Sanggona. Koperasi ini digagas oleh kelompok pasoema yang didampingi oleh tim AgFor Sulawesi dengan berfokus pada pengelolaan madu hutan tiris. Dalam satu tahun perjalanannya, koperasi ini telah melewati satu musim panen dan sudah memproduksi madu tiris \pm 500 kg. Pemasarannya bukan saja lintas kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara tapi juga antar provinsi, dan bahkan internasional.

Untuk pasaran tingkat nasional, dalam waktu kurang dari satu tahun, sekitar 100 kg madu hutan MPU sudah dipasarkan di Makassar, Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Ini merupakan sebuah potensi yang perlu dijaga dan dimaksimalkan baik itu dari aspek keberlanjutan produksi, kualitas produk, dan jaringan tata niga lokal, nasional, maupun internasional mengingat koperasi ini baru satu tahun usianya.

Menjaga Kemurnian Madu Hutan

Tim AgFor Sulawesi mulai memberikan pendampingan di Kecamatan Uluiwoi



Sungai Konaweha, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto oleh: ICRAF/La Ode Ali Said



Bapak Kusman, salah satu pasoema, menunjukkan madu hutan MPU yang telah dikemas. Foto oleh: ICRAF/Christine Mailoa

pada tahun 2013, dengan memperkenalkan cara panen madu lestari dan higienis; serta dilanjutkan dengan pelatihan pemasaran dan kewirausahaan pada Februari 2014. Salah seorang pasoema, Pak Kusman, mengatakan, “Sebelum adanya pendampingan dari AgFor tentang proses panen madu lestari dan higienis, kami melakukan proses panen secara tradisional. Kami memeras seluruh bagian sarang dengan tangan sehingga madu yang dihasilkan akan bercampur dengan bahan-bahan lainnya seperti lilin, pollen, dll. Hasil perasan itu kemudian dikemas dalam botol air mineral bekas dan siap dijual. Pada musim panen, harga madu berkisar antara Rp20.000,00–Rp30.000,00 per kg.

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh tim AgFor Sulawesi di desa ini antara lain berupa penguatan kelembagaan, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan pemasaran dan kewirausahaan masyarakat. Peningkatan kemandirian dan kerjasama

dalam mengelola sumber daya alam diharapkan dapat membuat masyarakat setempat memahami pentingnya menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan.

Setelah tim AgFor Sulawesi memperkenalkan cara panen madu lestari, proses panen dilakukan secara tiris dengan memotong sarang lebah menggunakan pisau anti karat (*stainless steel*). Kemudian madu disaring menggunakan kain saring berbahan nilon. Perlengkapan pendukung untuk proses panen madu lestari ini adalah baju pelindung, masker, dan tutup kepala bagi petani yang memproses madu.

Pergantian cara panen dari tradisional ke panen lestari terbukti telah meningkatkan harga jual madu menjadi Rp50.000,00–Rp55.000,00 per kg di musim panen. Tambahan lagi, sejak terbentuknya Koperasi Mepokoaso Pasoema Uluiwoi (MPU) pada tahun 2015, beberapa pengawas dari koperasi terlibat aktif memantau proses panen

sehingga madu yang dihasilkan benar-benar madu murni.

Jalur Distribusi Madu dan Keberlangungannya

Jalur distribusi madu hutan dari Desa Tawanga saat ini masih jauh dari sempurna. Sulitnya akses komunikasi dan tidak memadainya kondisi infrastruktur seperti jalan dan akses transportasi publik, mengakibatkan biaya distribusi madu ke ibukota provinsi menjadi mahal. Ditambah lagi dengan terbatasnya penyedia jasa pengiriman madu dari Kota Kendari ke luar provinsi. Sebagai contoh, saat ini harga pengiriman madu per kg ke Jakarta berkisar antara Rp27.000,00–Rp33.000,00 sehingga membuat harga jual madu lebih mahal. Tentunya, biaya pengiriman ke luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan domestik.

Adanya berbagai tantangan dan kesulitan di atas memanggil keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan menyediakan akses komunikasi bagi masyarakat Uluiwoi. Dua hal tersebut diyakini akan dapat menekan biaya transportasi dan distribusi untuk berbagai produk tani dari Uluiwoi, termasuk untuk produk madu hutan secara parsial. Lebih jauh lagi, para pengurus koperasi diharapkan dapat terus mencari jasa pengiriman yang memberikan harga khusus sehingga harga jual Madu MPU lebih kompetitif dan distribusinya dapat menjangkau seluruh nusantara dan menembus lebih banyak pasar internasional. ■

Meretas Jalan Kolaborasi Pengelolaan Hutan di Kawasan Konservasi Pengalaman dari Taman Hutan Raya (TAHURA) Nipa-Nipa

Penulis: Rustam BR, Hasantoha Adnan, Jhon Roy Sirait

Tahura (Taman Hutan Raya) Nipa-Nipa adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa, baik jenis asli maupun bukan asli. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan pariwisata.

Kawasan Tahura Nipa-Nipa ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 103 / Kpts-II/1999 pada tanggal 1 Maret 1999, yang sebelumnya bernama Tahura Murhum. Secara administratif, Tahura Nipa-Nipa (7.877,5 ha) terletak di dua wilayah pemerintahan kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe dan Kota Kendari. Di

bagian utara seluas 5.574,9 ha merupakan wilayah Kabupaten Konawe dan bagian selatan merupakan wilayah Kota Kendari dengan luas 2.302,6 ha.

Pembentukan Tahura Nipa-Nipa telah melalui proses panjang yang diwarnai sengketa antara masyarakat yang tinggal di sekitar



Lokakarya Refleksi Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, 5 Juni 2014, merekomendasikan pentingnya kolaborasi para pihak dalam pengelolaan Tahura Nipa-Nipa. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

pegunungan Nipa-Nipa dengan pemerintah yang berlangsung sejak 1974. Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dibuat atas prakarsa masyarakat dan pemerintah, namun selalu gagal, dimana Pemerintah ingin masyarakat meninggalkan hutan, sementara masyarakat ingin membangun pertanian di areal tersebut. Pada 2001-2007 melalui pendampingan LSM LEPMIL, teridentifikasi 17 Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH) dengan anggota sekitar 1030 keluarga dan mengelola lahan seluas 524,99 ha di kawasan blok khusus tahura dan dikeluarkan Perda No. 5/2007 tentang pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.

Kendati Perda No. 5/2007 telah mengatur mekanisme kolaborasi, namun sejak ditetapkan belum ada satu pun kesepakatan kolaborasi antara KTPH dengan UPTD yang memberikan izin pengelolaan. Beberapa kendala pada saat itu diantaranya belum adanya aturan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi. Perda juga tidak mengatur cakupan kegiatan yang dapat dikolaborasikan. Selain itu Pihak UPTD Tahura Nipa-Nipa, masih belum menemukan strategi yang tepat mengakomodir KTPH dalam Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagai hutan konservasi.

Meskipun demikian, beraneka praktek pengelolaan sudah berjalan, seperti pengelolaan kebun oleh KTPH yang ditanami tanaman produktif dan bernilai ekonomi (seperti cengkeh, mete, maupun buah-buahan) sehingga menjadi sumber penghasilan alternatif

keluarga. Selain itu juga ada wisata air terjun, pengelolaan air minum, hingga penggunaan kawasan untuk lintasan sepeda gunung. Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Kehutanan menerbitkan peraturan baru terkait pengelolaan Jasa Lingkungan Wisata Alam, Jasa Lingkungan Air maupun pembentukan Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK) yang belum terakomodasi di dalam Perda No. 5/2007 tersebut.

Pada tahun 2012, dimulailah proses pendampingan multipihak yang dilakukan oleh tim AgFor dengan bersandar pada filosofi “nasi bambu,” makanan khas Sulawesi Tenggara, dimana nasi yang telah diberi bumbu, dimasak di dalam wadah bambu. Bambu dibakar dari berbagai arah agar matang sempurna. Filosofi ini menjadikan proses pendampingan dilakukan secara multipihak, bukan hanya satu pihak; sehingga ketika dipertemukan, para pihak telah siap untuk bersepakat.

Jalan panjang ditempuh, mulai dari melakukan kajian awal ('baseline'), mengidentifikasi para pihak, hingga serangkaian program pengembangan kapasitas, baik untuk KTPH maupun peningkatan kapasitas staf UPTD Balai Pengelola (BP) Tahura Nipa-Nipa. Komunitas Teras bersama tim AgFor dari komponen tata kelola melakukan kajian cepat kapasitas kelembagaan terhadap 17 KTPH yang ada. Hasilnya, hanya 4 KTPH yang masih jelas bentuk kelembagaan kelompoknya, ada pengurus dan anggota

serta memiliki program dan kegiatan. Empat KTPH itu adalah Tumbuh Subur, Subur Makmur, Medudulu, dan Pokadulu Dua. Selain itu, tim AgFor juga melakukan kajian kerentanan dan potensi kehati serta pengembangan kebun bibit masyarakat. Intinya, keempat KTPH ini difasilitasi untuk mengembangkan model pengelolaan lahan dan kawasan yang berdasarkan prinsip tata kelola yang mendukung pada pelestarian alam dan kesejahteraan.

Setelah kedua belah pihak siap, tim AgFor memulai proses multipihak dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Bersama Tahura Nipa-Nipa pada Bulan Mei 2015. Pokja yang terdiri dari Staf UPTD BP Tahura Nipa-Nipa, perwakilan 4 KTPH dan Komunitas Teras, kemudian merumuskan visi dan misi Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa. Menurut Rustam Br, Kasie Program UPTD Tahura Nipa-Nipa, keberadaan Pokja mampu merubah prasangka jelek antara UPTD BP Tahura Nipa-Nipa terhadap keberadaan KTPH, maupun sebaliknya, menjadi prasangka yang baik dan hal tersebut menjadi landasan awal untuk membangun kolaborasi. Selanjutnya, Pokja dengan melibatkan para anggota dari 4 KTPH melakukan pemetaan potensi kehati, penyusunan blok pemanfaatan lahan untuk KTPH, hingga menyepakati rencana kelola dan jenis tanaman yang boleh ditanam di lahan kelola KTPH, serta lokatitah penanganan konflik sumberdaya alam hingga studi banding ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KTPH dan UPTD Tahura Nipa-Nipa. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KTPH dan UPTD Tahura Nipa-Nipa. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Selain pengembangan kapasitas, penguatan kebijakan juga dilakukan. Diawali dengan lokakarya multipihak Refleksi Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa pada Juni 2014 yang merekomendasikan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dan usulan program, kegiatan maupun strategi untuk kelembagaan kolaborasi tersebut. Langkah selanjutnya merevisi Perda Provinsi No. 5/2007, melalui kajian dan konsultasi publik kemudian lahir Perda No. 6/2014 yang memberikan ruang implementasi kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa melalui mekanisme kemitraan untuk pemanfaatan lahan hutan pada September 2014. Agar menjadi lebih operasional, dilanjutkan dengan menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Tahura Nipa-Nipa, Rencana Rehabilitasi dan Rencana Blok (pada Oktober 2014). Sesudahnya mulailah dirancang proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub)

untuk penerapan kolaborasi, melalui serangkaian diskusi dan konsultasi publik. Akhirnya pada Bulan Juni 2016 disahkanlah Pergub No. 18/2016 Kolaborasi Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.

Menandai disahkannya Pergub tersebut, pada 22 Juni 2016 dilakukan penandatanganan naskah kesepahaman kerjasama (MoU) Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa antara UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa dengan KTPH Subur Makmur. Langkah membangun kolaborasi ke depan khususnya KTPH yang berada dalam blok khusus yaitu menerapkan pola wanatani yang berorientasi pada konservasi lahan dan peningkatan produksi hasil tanaman. Pengelolaan lahan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Lebih mengedepankan pengolahan lahan yang sifatnya konservasi lahan;
- Jenis tanaman MPTS, lebih mengutamakan tanaman yang memiliki nilai pohon

tidak komersial;

- Pengelolaan tanaman, diharapkan memiliki ciri produksi khas Tahura Nipa-Nipa;
- Tanaman yang dikembangkan memiliki cakupan kanopi yang menutup lahan terbuka, serta bersifat organik.
- Mengembangkan model/ pola pertanaman sebagai kebun campuran yang mendukung upaya konservasi lahan.
- Lebih mengutamakan produksi Hasil Hutan Non Kayu.

Menurut Ir. Wiratno, MSc, selaku Direktur PKPS KLHK, dalam sambutannya pada penandatanganan MoU tersebut, menyatakan, "Ini adalah contoh bagaimana perhutanan sosial juga dapat diterapkan di kawasan konservasi, bukan saja untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan pelestarian hutan itu sendiri." ■

“Berbagi Ilmu, Memperbaiki Hidup”

Pengalaman Petani Penyuluh AgFor dari Desa Lawonua, Sulawesi Tenggara

Penulis: Hendra Gunawan

Secara geografis, Desa Lawonua di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe merupakan suatu wilayah yang dikelilingi hutan, kebun sawit, dan sempadan hilir Sungai Konawe yang panjang dan terbentang sangat luas. Penduduk desanya sendiri terdiri dari beberapa suku berbeda yang semuanya mendiami lokasi lahan pertanian. Suku-suku itu antara lain adalah Tolaki, Makasar, dan Bugis. Keberadaan suku asli dan pendatang yang hidup berdampingan ini tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan di Desa Lawonua; dari tingkat mata pencaharian

sampai perkembangan politik desa.

Mata pencaharian utama penduduk desa adalah bertani. Salah satu tanaman yang digemari oleh sebagian besar petani adalah merica. Budi daya merica diperkenalkan ulang oleh tim AgFor Sulawesi saat memulai kegiatannya di desa ini pada tahun 2012 dengan mendatangkan ahli merica dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), ibu Dyah Manohara dalam sekolah lapang merica. Saat itu, Desa Lawonua terpilih menjadi tempat kegiatan percontohan pengelolaan pembibitan dan kebun belajar

AgFor. Pembibitan tanaman buah dan merica sangat jarang ditemukan di sekitar Kabupaten Konawe.

Melalui sekolah lapang tersebut, petani mempelajari ilmu baru dari Ibu Dyah Manohara, yaitu mengenai perbanyakan stek merica satu ruas. Setelah ilmu tersebut diperkenalkan, tim AgFor mendampingi petani dalam penerapan ilmu baru tersebut. Selain mendapatkan ilmu baru, melalui sekolah lapang ini juga dicetak petani penyuluh yang dipilih dari petani yang paling aktif dan terampil selama sekolah lapang dilakukan.

Agus (41) adalah salah satu petani penyuluh AgFor di Desa Lawonua yang terpilih sebagai petani penyuluh yang diminta untuk menyebarkan ilmu baru yang diterima dari AgFor ke petani lain dari desa-desa AgFor lainnya. Dengan partisipasinya yang aktif di AgFor, Agus mendapatkan banyak ilmu baru, yang menurutnya “Sebelum mengikuti sekolah lapang AgFor, kami tidak pernah mengetahui bagaimana cara budi daya merica. Baru setelah mengikuti berbagai kegiatan pendampingan AgFor, mata dan pikiran kami seperti dibukakan untuk terus berusaha menghasilkan bibit unggul merica dan tanaman lainnya. Ditambah lagi dengan adanya pelatihan pembuatan



Kegiatan berbagi ilmu dan praktik mengenai pembuatan pupuk organik kepada sesama petani di Desa Onembute. Foto oleh World Agroforestry Centre (ICRAF)

pupuk organik yang diajarkan oleh AgFor, telah membuat hasil panen kebun kami meningkat pesat.”

Setelah 4 tahun bergabung dengan AgFor baik sebagai anggota kelompok tani AgFor maupun sebagai petani penyuluh AgFor, perawatan kebun merica milik pak Agus kini lebih teratur dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk budidaya merica yang baik. Dengan tujuan untuk memotivasi para tetangga untuk meniru keberhasilan yang sudah diperolehnya, Agus menjadikan kebunnya sebagai contoh pengelolaan kebun yang baik. Tantangan terbesar yang ditemui pak Agus selama melakukan penyuluhan ke petani lain adalah merubah pola pikir sesama petani yang cenderung masih belum secara intensif mengelola kebunnya. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah, terutama jika yang ingin dirubah adalah teman sesama petani dari desa yang sama.

Akan tetapi, melalui kebun contohnya, usaha keras



Bapak Agus melakukan kegiatan pemasaran untuk hasil kebunnya. Foto oleh World Agroforestry Centre (ICRAF)



Kebun merica milik Bapak Agus, salah satu petani binaan AgFor di Desa Onembut. Foto oleh World Agroforestry Centre (ICRAF)

Agus dalam merawat kebun mericanya berhasil menarik perhatian para petani tetangganya karena mereka telah melihat hasil yang ia dapatkan. Mereka termotivasi untuk menerapkan ilmu baru budi daya merica setelah melihat hasil kebun Agus yang memuaskan. Tanpa ragu, Agus membagi ilmunya kepada sesama petani dan bersama-sama saling berusaha menimbulkan jiwa bisnis dengan menjual hasil produksinya agar dapat mandiri secara finansial.

Kini, salah satu kegiatan rutinitas Agus bersama beberapa petani didikannya adalah mendampingi sesama petani yang mau belajar ilmu tentang budidaya merica dan juga tanaman agroforestri lainnya yang telah dipelajari oleh Agus melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan yang telah dilakukan AgFor sejak tahun 2012. Pembibitan merica yang dihasilkan Agus dan teman-temannya selalu dicari banyak pembeli dan banyak di antaranya yang telah menjadi distributor bibit ke berbagai wilayah. Bahkan di beberapa tempat, bibit merica yang dihasilkan oleh petani

AgFor juga dikenal dengan bibit merica AgFor.

“Saya sering memergoki orang yang sengaja belajar stek satu ruas. Sekaligus bagaimana caranya memelihara tanaman merica supaya terhindar dari hama penyakit sesuai dengan arahan yang pernah diberikan oleh tim AgFor. Di Desa Lawonua, hampir setiap hari, saya melihat sekitar 5-10 petani mulai membuat pembibitan keluarga, yang awalnya mereka adalah bagian dari pembibitan Kelompok Tani Bersatu binaan AgFor.” ujar Agus.

Kini, selain masih aktif membagikan ilmunya yang diterima dari Agfor, Agus juga masih meneruskan pekerjaan membuat bibit merica. “Dalam berbagai kunjungan penyuluhan, saya melihat stek satu ruas ini masih terus dipraktikkan oleh banyak petani di Desa Lawonua ini, ujar Hasanuddin, Koordinator penyuluh BP3KKP, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, yang merasa sangat tertolong dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dengan adanya petani penyuluh swadaya seperti Agus. ■



Kisah Sukses dari Gorontalo

36 Rumah Kompos Cempaka: Menghubungkan Petani dengan Pemangku Kepentingan

38 Menjajaki Kemitraan Antara Petani dan Penangkar Bibit di Provinsi Gorontalo

41 Menuju Kelestarian Bambu di Cagar Alam Tangale

43 Meminimalisir Bahaya Erosi dengan Pola Tani Berkontur dan Sistem Agroforestri

Rumah Kompos Cempaka: Menghubungkan Petani dengan Pemangku Kepentingan

Penulis: M. Iqbal



Rumah Kompos Cempaka. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)

Untuk mendukung program Gerakan Sejuta Kakao di Kabupaten Boalemo, nota kesepahaman antara AgFor Sulawesi dan pemerintah Kabupaten Boalemo pun ditandatangani pada 5 November 2014, dan menjadi awal terciptanya Kelompok Tani Cempaka di Desa Batumoito, Kabupaten Boalemo. Tim AgFor Sulawesi memulai kegiatannya dengan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan agroforestri (kebun campuran) dan kehutanan yang setara dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan mutu produktivitas tanaman perkebunan dilakukan dengan mengadakan kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas, penyebaran dan pertukaran informasi agroforestri, serta pemberdayaan masyarakat berbasis agroforestri.

Di Dusun Mebongo, Desa Botumoito, kegiatan

peningkatan kapasitas petani dalam mengelola sumber daya alam selalu menarik banyak petani. Kegiatan tersebut diantaranya adalah pembuatan pembibitan, informasi teknis pembuatan bibit tanaman perkebunan dan tanaman buah, perawatan bibit, perlakuan bibit secara vegetatif dan generatif, serta manajemen kebun dan manajemen kelembagaan petani. Dengan difasilitasi oleh tim AgFor, beberapa petani membentuk satuan kelompok tani "Cempaka" yang beranggotakan 25 orang petani (15 laki-laki dan 10 perempuan) diketuai oleh Zainudin Iyabu (Kepala Dusun Mebongo).

Tahun 2015 tim AgFor memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik dan membangun rumah kompos sederhana dengan memanfaatkan material dan bahan-bahan yang ada di sekitar desa, di kebun milik petani, seperti bambu untuk tiang bangunan rumah kompos, seresah dedaunan, alas terpal, kotoran

ternak yang berasal dari hewan peliharaan, dan batang pisang.

Tahap pertama pembuatan kompos ini menghasilkan pupuk sebanyak 70 karung dengan masing-masing seberat 40 kg. Tahap kedua meningkat jadi 83 karung dan terjual dengan harga Rp1.500,00/kg. Pasar penjualan pupuk ini adalah ke beberapa desa tetangga seperti Desa Rumbia, Desa Hutamonu (Kecamatan Botumoito), Desa Dulupi (Kecamatan Dulupi), serta beberapa kantor instansi pemerintah. Kini, penghasilan bersih yang didapat kelompok dalam sekali produksi bisa mencapai Rp500.000,00 bahkan bisa lebih, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami," ucap Zainudin Iyabu penuh syukur.

Selain memberikan dampingan untuk rumah kompos pembuatan pupuk organik, tim AgFor juga memberikan pelatihan budi daya tanaman pala, cengkeh, durian, kopi, lengkung, dan manggis. Dengan keseriusan dan kesungguhan setiap anggota kelompok ini untuk belajar dan menjadi lebih baik, kelompok ini sukses mengembangkan sebuah pembibitan kelompok. Di awal tahun 2016, hampir setiap anggota kelompok memiliki pembibitannya sendiri.

Kesungguhan dan kerja keras serta hasil produksi unggulan kelompok Cempaka ini menarik minat Pemerintah Daerah Boalemo, khususnya dinas pertanian dan perkebunan. Kepala Dinas



Bekerja bersama membangun rumah kompos yang sederhana. Foto oleh: ICRAF/M. Iqbal

Pertanian dan Perkebunan Boalemo, Handriyadi, mengatakan, "Manajemen lahan dan pemanfaatan limbah pertanian serta kotoran ternak merupakan hal yang sangat membangun peningkatan kapasitas dan pendapatan petani. Saya sangat mendukung keberlanjutan kegiatan ini; dan berharap peningkatan ini bisa diimitasi di desa, bahkan kabupaten lainnya."

Dukungan dari dinas pertanian dan perkebunan mulai dirasakan masyarakat desa dan kelompok tani Cempaka melalui beberapa mitra penyuluh lapangan dari Kantor BP3K Kecamatan Botumoitto yang memberikan dampingan dalam hal administrasi untuk mendapatkan bantuan resmi dari pemerintah.

Perjuangan kelompok akhirnya membuahkan hasil. Melalui



Aktivitas anggota masyarakat di rumah kompos. Foto oleh: ICRAF/M. Iqbal

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo, kelompok tani Cempaka kini menjadi salah satu penerima bantuan dari kementerian pusat dalam program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2015. Bersama penerima bantuan lainnya yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Boalemo, kelompok tani Cempaka mendapatkan fasilitas yang selama ini diimpikan, yaitu rumah kompos permanen, mesin pencacah rumput organik, kandang ternak sapi beserta 10 ekor sapi, dan kendaraan roda tiga sebagai alat mobilisasi.

Tepat di Bulan Januari 2016, dana bantuan ini diterima. Pembangunan rumah kompos menjadi gedung permanen dilakukan berbagai pihak. Dengan pengetahuan memadai tentang cara membuat bibit unggul, cara menanam dan membuat lubang tanam, serta manajemen lahan untuk membuat kebun campur dan mengintegrasikan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, kelompok tani Cempaka setidaknya memiliki pohon kakao (57 pohon), pala (65 pohon), merica (62 pohon), dan cengkeh (65 pohon).

"Kini saya dan semua anggota kelompok memiliki tempat pembibitan bersama yang permanen. Kami akan terus mengasah pengetahuan dalam hal pembuatan bibit unggul untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual," ujar Zainudin Iyabu. "Terima kasih tak terhingga kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo; serta teman-teman AgFor yang telah mengubah sesuatu yang sangat sederhana menjadi sangat luar biasa." ■

Menjajaki Kemitraan Antara Petani dan Penangkar Bibit di Provinsi Gorontalo

Penulis: Awaluddin, Sahabuddin, Paharuddin, Hamsir, Duman Wau

Kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang berupaya untuk mengubah pola monokultur jagung menjadi komoditi tanaman tahunan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan sistem agroforestri pada lahan-lahan perkebunan petani. Beberapa kebijakan tersebut diimplementasikan melalui beberapa program antara lain Program Sejuta Kakao yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Boalemo, serta Program Pewilayahan Komoditas dan Pengembangan Kawasan Agrowisata dan Hortikultura Terpadu yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Program-program tersebut tentunya berdampak pada kebutuhan bibit tanaman untuk komoditi-komoditi yang akan dikembangkan. Di Kabupaten Boalemo per tahun 2017, kebutuhan bibit terbesar adalah pada komoditi kakao, cengkeh, dan pala, dengan angka mencapai 400.000 bibit untuk kakao, 60.000 untuk cengkeh, dan 30.000 untuk bibit pala. Di Kabupaten Gorontalo, kebutuhan bibit cengkeh, pala, dan lada (merica), masing-masing adalah 200.000, 50.000, dan 50.000 bibit untuk tahun 2017. Jumlah ini belum termasuk

bibit tanaman buah-buahan yang akan dikembangkan di kawasan agrowisata dan hortikultura terpadu yang terdiri dari durian, nangka, mangga, dan lain-lain. Kebutuhan bibit ini bahkan masih terbilang sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah sediaan lahan yang memungkinkan untuk pengembangan komoditi tersebut. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap bibit unggulan komoditi-komoditi tersebut diyakini masih akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepan.

Selama beberapa tahun terakhir, pengadaan bibit komoditi tersebut didatangkan dari luar Provinsi Gorontalo, seperti dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk kakao dan lada, dari penangkar di Sulawesi Utara dan Maluku untuk komoditi pala, serta dari beberapa daerah lain untuk komoditi buah-buahan, bahkan hingga didatangkan dari Pulau Jawa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usaha penangkaran bibit adalah usaha yang memiliki peluang dan prospek cerah di Provinsi Gorontalo.

Syarat pengembangbiakan tanaman serta jual beli bibit tanaman yang dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Tanaman juga membuat peredaran bibit tidak boleh dilakukan secara serampangan

melainkan harus mengacu pada ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku. Misalnya dalam hal sertifikasi benih, sumber benih yang jelas, dan lain-lain. Oleh karena itu, keahlian dalam usaha penangkaran bukan hanya pada masalah keterampilan teknis pemeliharaan bibit semata, tetapi juga pada pemahaman aturan yang berlaku, sehingga tidak mudah bagi seorang petani atau penangkar baik skala besar maupun kecil untuk mengupayakan pemasaran bibit tanaman ini.

Tim AgFor Sulawesi di Provinsi Gorontalo telah mendampingi 22 kelompok tani di dua kabupaten (Gorontalo dan Boalemo) untuk melakukan kegiatan pembibitan ini. Sebagian besar kelompok dan petani yang didampingi telah mampu dan memiliki kapasitas secara teknis untuk membudidayakan, memelihara, dan menghasilkan bibit berbagai komoditi. Diantaranya adalah cengkeh, pala, kakao, merica, durian, rambutan, nangka, dan lain-lain. Sebagian besar pembibitan kelompok telah berhasil bahkan hingga tataran distribusi penanaman di kebun, dan telah tumbuh dengan baik di kebun-kebun petani yang didampingi.

Usaha pembibitan ini kemudian juga diminati oleh beberapa petani dalam skala individu, sehingga banyak petani yang melakukan pembibitan sendiri di halaman rumah/pekarangan. Tujuannya adalah selain untuk keperluan sendiri, juga untuk dijual pada petani lain yang tidak tahu cara membibitkan tanaman.

Beberapa kelompok telah melakukan pemasaran bibit ini dan membuka mata para petani bahwa bibit ini memiliki nilai ekonomis yang cukup baik sebagai usaha. Kelompok Delita di Desa Botumoputi menjual



Kebun pembibitan kakao milik Arman Ibura di Desa Bendungan, Kabupaten Boalemo. Foto oleh: ICRAF/Hamsir

500 bibit nangka kepada CV. Mitra Tani. Kemudian kelompok Huyula di Desa Botumoito menjual bibit pala sebanyak 150 pohon, juga kepada CV. Mitra Tani, serta penjualan bibit nangka dari kelompok Modelidu Lestari kepada Forest Modelidu di Kabupaten Gorontalo.

Penjualan-penjualan dalam skala kecil ini menstimulasi kelompok bahwa bibit yang mereka produksi selain membuat mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan lahannya sendiri, juga memiliki nilai ekonomis yang bisa menjadi usaha. Tim AgFor Sulawesi mengapresiasi minat usaha ini sebagai salah satu langkah pengembangan usaha yang berkelanjutan karena usaha ini dapat berkembang dan membawa manfaat besar. Berawal dari pengetahuan dan keterampilan, kemudian berubah menjadi hobi, dan meningkat menjadi mata pencaharian yang memiliki nilai usaha yang sangat potensial, bahkan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sebagaimana layaknya sebuah usaha yang dimulai dari skala kecil, usaha pembibitan atau penangkaran skala kecil milik petani diarahkan untuk bermitra dengan penangkar besar yang sudah lebih dulu berkembang di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang terkumpul, ada beberapa penangkar dalam bentuk badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kab. Boalemo, yaitu CV. Mitra Tani, CV. Puncak Mekar, CV. Fresia Utama, Forest Modelidu, dan beberapa penangkar individu. Walaupun demikian, beberapa penangkar ternyata hanya berfokus pada tanaman kehutanan dan penghijauan seperti bibit mahoni, jati, gamelina, agatis, lamtoro, nyato, dll. Sementara, untuk tanaman perkebunan seperti cengkeh, kakao, pala, dan tanaman buah lainnya, hanya dilakukan oleh tiga penangkar besar yaitu, CV. Mitra Tani, CV. Puncak Mekar, CV. Fresia Utama.

Walaupun memiliki pengalaman panjang di bidang pemasaran bibit, para penangkar besar ini masih terkendala pada keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan besarnya volume kebutuhan bibit. Kondisi ini mengakibatkan tidak mampunya para penangkar ini menangani kebutuhan bibit dalam jumlah besar sehingga mengharuskan mereka untuk bekerjasama, bermitra, berjejaring, dan bahkan mengadakan pemasokan bibit dari luar Provinsi Gorontalo apabila pasokan bibit dalam daerah tidak mencukupi.

Para penangkar besar ini menyambut baik upaya tim AgFor Sulawesi untuk mengembangkan usaha petani individu dan kelompok tani binaannya dalam bidang usaha pembibitan atau penangkaran. Para penangkar siap membantu dan bekerjasama dengan petani untuk mengembangkan usaha ini, bermitra dalam pemasaran bibitnya, serta bermitra dalam hal teknis pemeliharaan juga asistensi usaha. Keinginan ini didasari oleh ketidakmampuan dari satu penangkar untuk menangani sendiri jumlah bibit yang banyak, apalagi masalah ketersediaan lahan dan biaya operasional yang besar. Dengan adanya kemitraan akan membantu penangkar dari sisi sebaran stok, tenaga kerja, juga lahan usaha. Dari sisi petani penangkar, keuntungannya adalah pada pemasaran bibit, keterjaminan harga dan volume pasar, benih yang tersertifikasi, serta dukungan sarana produksi bibit.

Mitra penangkaran yang dipilih untuk bekerjasama dengan kelompok tani binaan AgFor di Kabupaten Boalemo adalah CV. Fresia Utama yang berlokasi di Kecamatan Pagatu, wilayah perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Kab. Pohuwatu. Petani binaan AgFor yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan CV. Puncak Mekar yang berlokasi di Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo.



Benih kakao yang sudah mulai berkecambah di Desa Bendungan, Kabupaten Boalemo, milik Arman Ibura. Foto oleh: ICRAF/Hamsir

Kemitraan ini diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kelompok/petani penangkar dengan perusahaan penangkar. MoU ini juga mencakup dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, jaminan pembelian, harga, dan model kerjasama. Resminya kemitraan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam pengembangan usaha penangkaran dari para petani binaan, sekaligus sebagai sarana untuk belajar berwirausaha, belajar memahami pola distribusi dan pemasaran bibit, belajar memahami pola penyedia jasa dalam proses tender, memahami aturan perlindungan tanaman dan perbanyak bibit, serta belajar keterampilan teknis di bidang usaha pembibitan.

Harapan besar tersimpan dalam kemitraan ini. Dalam beberapa tahun ke depan, para petani penangkar yang memulai usaha dari skala kecil ini diharapkan berhasil mengembangkan sayapnya menjadi penangkar dengan kapasitas yang lebih besar, menyerap tenaga kerja, menjadi sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi solusi daerah dalam hal penyediaan bibit-bibit tanaman yang unggul, berkualitas, dan tersertifikasi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat berkontribusi dalam program-program pemerintah seperti Program Sejuta Kakao, integrasi tanaman dan Pengembangan Kawasan Agrowisata dan Hortikultura dengan sistem agroforestri. ■



Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., melakukan penanaman bambu di kawasan Cagar Alam Tangale. Foto oleh: ICRAF/Dewi Biahimo

Menuju Kelestarian Bambu di Cagar Alam Tangale

Penulis: Sri Dewi Biahimo

Cagar Alam (CA) Tangale adalah sebuah cagar alam kecil yang terletak antara Desa Buhu dan Labanu di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Di cagar alam ini, menurut pengakuan Kisman Yusuf, kepala CA Tangale, paling banyak terjadi perambahan bambu oleh masyarakat sekitar untuk dibuat kerajinan dinding dan pembuatan nasi buluh/ nasi jaha. Nasi buluh atau nasi jaha adalah penganan tradisional seperti nasi lemang yang dimasak dalam potongan sejenis bambu yang banyak

tumbuh di kawasan CA Tangale. Fadli Otuhi, Kepala Desa Labanu menambahkan, bahwa sekarang sudah sangat sulit untuk mencari bambu kuning yang banyak diperlukan dalam setiap upacara adat di Gorontalo. Karena bambu kuning menjadi langka, maka dalam upacara adat mereka menggunakan bambu hijau yang dicat kuning. Atau jika masyarakat tetap menginginkan bambu kuning, mereka harus membeli dengan harga mahal atau terpaksa merambah ke dalam Cagar Alam Tangale, dengan resiko tertangkap dan diproses secara hukum.

Di sisi lain, Ramsi Toyili, salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Mootilango yang bertetangga dengan Desa Labanu menuturkan, ia dan beberapa warga tetangganya banyak mendapatkan keuntungan dari tanaman bambu yang mereka tanam di lahan dan pekarangan mereka. Selain keuntungan material sebagai bahan bangunan, mereka juga mendapatkan keuntungan dari sumber air yang terjaga meskipun musim kemarau berkepanjangan melanda daerah mereka. Ramsi Toyili adalah salah satu peserta pelatihan penanaman dan diversifikasi produk bambu yang dilakukan oleh tim AgFor Sulawesi di Gorontalo pada 3–5 Juni 2016.

Tim AgFor Sulawesi, melalui komponen lingkungan bekerja di empat desa yang tergabung dalam satu kluster yang disebut sebagai kluster Tibawa yakni Desa Mootilango, Labanu, Buhu, dan Mootilango. Keempat desa ini terpilih karena posisi bentang alamnya berada di Daerah Aliran Sungai Alo yang berkontribusi besar terhadap sedimentasi di Danau Limboto dan juga sebagai kawasan penyangga bagi CA Tangale yang menyimpan flora dan fauna endemik Gorontalo.

Proses untuk sampai pada pelatihan ini bukanlah sebuah proses yang singkat. Tim AgFor Sulawesi di Gorontalo memulainya dengan studi kerentanan dan analisis SWOT di empat desa ini dan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari perwakilan masyarakat dari empat desa, pemerintah daerah, Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber

Daya Alam (BKSDA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pokja ini bertugas menyusun strategi penghidupan berwawasan lingkungan untuk pengelolaan bentang lahan di sekitar CA Tangale yang merupakan hulu DAS Alopohu. Setelah dokumen ini selesai tim AgFor kemudian melakukan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dan pokja berupa monitoring hidrologi dan biodiversitas, selain pemetaan lahan-lahan kritis yang menjadi prioritas untuk ditanami kembali.

Untuk menjamin keberlanjutan program penanganan lahan kritis ini setelah program AgFor selesai, dibangunlah sebuah kesepakatan antara masyarakat keempat desa dengan BPDAS sebagai lembaga penyelia bibit, dan BAPPEDA sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sebagai acuan, hasil pemetaan lahan kritis yang dilakukan oleh

AgFor, Pokja, dan masyarakat menjadi lokasi prioritas bagi ketiga pihak yang bersepakat untuk ditanami kembali.

Setelah kesepakatan ini terbangun, tim AgFor bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan penguatan kapasitas bagi masyarakat berupa pelatihan di empat desa ini yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan festival bambu. Dalam pelatihan ini, masyarakat belajar mengenali jenis-jenis bambu dan manfaatnya, serta info teknis membibitkan bambu. Sebagai bagian kegiatan pelatihan, Bupati Gorontalo berpartisipasi melakukan penanaman bambu di bantaran Sungai Alo yang berbatasan dengan CA Tangale. "Tangale ini adalah tempat saya melewati masa kanak-kanak saya. Saya ingin kita semua mengembalikannya menjadi hijau seperti dulu. Saya berpesan kepada para kepala

desa dan masyarakat yang ikut dalam pelatihan ini untuk menjaga dan memastikan keberlangsungan hidup bibit bambu. Festival bambu akan menjadi agenda tahunan pemerintah, dan saya berharap masyarakat yang dilatih AgFor hari ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo yang lain tentang bagaimana membibitkan dan memelihara bambu sehingga kita tidak perlu memanggil tenaga ahli dari luar provinsi untuk menjadi pelatih. Bapak ibu sekalianlah yang akan menjadi pelatihnya," ujar Bupati Gorontalo Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M. Pd.

Semangat tinggi para peserta dan dukungan dari Pemda setempat untuk melestarikan bambu ini merupakan langkah awal timbulnya kesadaran masyarakat bahwa kehidupan mereka bergantung pada kelestarian lingkungan CA Tangale. Tim AgFor telah membangun mekanisme dengan masyarakat untuk memastikan agar lahan-lahan kritis ditanami bibit yang disediakan oleh BPDAS.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga sudah memasukkan Kecamatan Tibawa sebagai kawasan resapan air dan Tangale sebagai kawasan pelestarian alam dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RANPERDA RTRW) setempat.

"Saya yakin bambu yang lestari akan kembali merimbunkan Tangale dan kawasan sekitarnya, memberikan berkah penghidupan serta menghindarkan penduduknya dari longsor dan banjir yang sering melanda." lanjut Sang Bupati. ■



Koordinator Proyek AgFor Provinsi Gorontalo, Duman Wau, dan timnya sedang berdiskusi dengan Bupati Gorontalo. Foto oleh: World Agroforestry Centre (ICRAF)



Kegiatan pelatihan NVS (*Natural Vegetative Strip*) atau terasering yang diberikan oleh Agustin R. Mercado Jr, PhD bulan Agustus 2016. Foto oleh: ICRAF/Nurain Lapolo

Meminimalisir Bahaya Erosi dengan Pola Tani Berkontur dan Sistem Agroforestri

Duman Wau dan Sahabuddin Hamid

Bahaya Erosi Monokultur Jagung di Lahan Kemiringan Tinggi

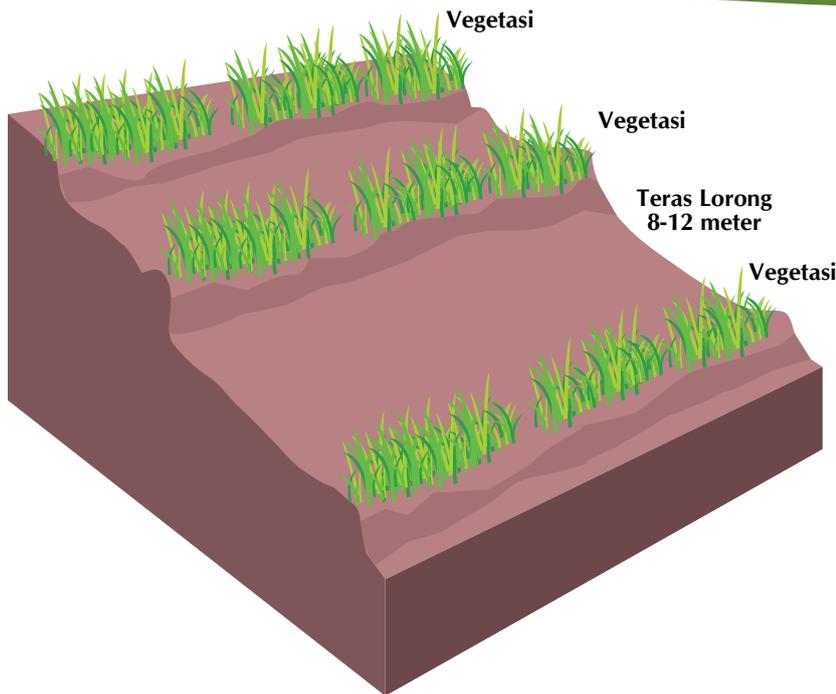
Sepanjang tahun perbukitan Gorontalo memiliki warna yang berubah-ubah, tergantung dari pertumbuhan tanaman monokultur jagung yang mendominasinya. Hijau ketika saat penanaman dan pertumbuhan jagung, coklat dan kekuningan ketika musim panen tiba, dan berubah menjadi lahan terbuka tanpa vegetasi

ketika masa pembersihan lahan untuk musim tanam berikutnya. Dibalik dinamika keindahan ini, terselip bahaya ekologis, ekonomi, dan sosial.

Enam puluh persen bentang alam Gorontalo adalah perbukitan sehingga menyebabkan petani berladang hingga di lahan berlereng, dengan jagung sebagai tanaman dominannya. Jagung membutuhkan sinar matahari penuh, sehingga pohon-pohon

yang bisa menyerap dan menahan laju air, dianggap mengganggu dan biasanya ditebang. Hal ini menyebabkan berkurangnya debit air secara dramatis ketika musim kering, tetapi ketika musim hujan terjadi erosi besar-besaran atau banjir coklat dan menghasilkan sedimentasi di sungai serta pendangkalan sungai.

Erosi yang terjadi tidak hanya menimbulkan persoalan di badan sungai. Menurut



Ilustrasi 1: terasering. Pembuatan NVS yang bisa menghasilkan lahan berteras (Adopsi dari https://qt.wocat.net/qt_summary.php?lang=english&qt_id=292)

penelitian yang dilakukan oleh Jun Mercado dari ICRAF Filipina dengan topografi yang mirip dengan Gorontalo dapat mengalami kehilangan tanah lapisan atas sekitar 50 sampai dengan 300 ton/ha/tahun, dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 3-18 juta per ha/tahun akibat berkurangnya kesuburan tanah yang menyebabkan petani harus menggunakan lebih banyak pupuk. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang semakin tinggi ini, menyebabkan residu kimia yang ada di tanah menjadi bahan ikutan erosi dan menyebabkan kualitas air menurun.

Tingginya tingkat erosi di Gorontalo juga ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan BPDAS dan Sri Legowo pada tahun 2010, yaitu tingginya erosi tanah dari DAS Limboto yang mencapai 45-108 ton/ha/tahun. Tingginya erosi dapat

mengakibatkan Danau Limboto suatu saat akan menghilang menjadi daratan karena mengalami pendangkalan. Erosi menyebabkan kesuburan tanah di Gorontalo mulai menurun. Konsekuensi dari penurunan kesuburan tanah tersebut adalah pembukaan hutan sebagai ladang baru karena ladang untuk mendapatkan lahan yang subur. Tanpa perubahan tindakan yang berarti terhadap persoalan ini maka bencana ekologis berada di ambang pintu.

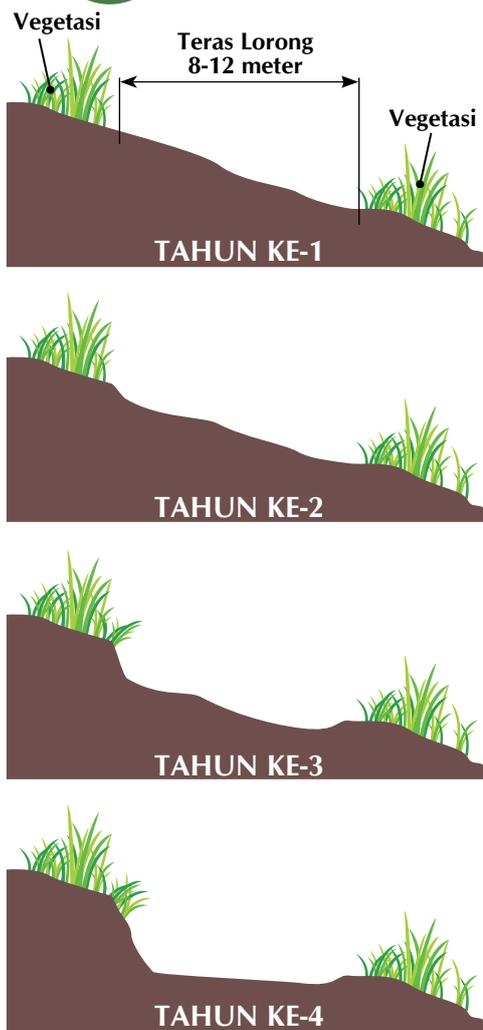
Hajarah, seorang petani perempuan binaan AgFor, berkomentar tentang perubahan lingkungan yang terjadi beberapa tahun terakhir. "Dulu di sini tidak sampai sekering ini. Baru belakangan ini terjadi. Di musim hujan, hanya beberapa jam hujan saja, sungai meluap, berwarna coklat dan banjir. Sebidang tanah saya di pinggir sungai itu yang saya tanam sekitar 100

pohon lada dan rica (cabe) hilang dibawa banjir. Sudah 30 tahun saya di sini tidak pernah terjadi seperti itu."

Secara ekonomi, dengan monokultur jagung petani dapat memperoleh pendapatan dalam 3-4 bulan, tapi ini tidak mampu membawa petani keluar dari kemiskinannya. Seperti yang dituturkan oleh seorang petani di Boalemo yang sudah mulai enggan menanam jagung, Zainuddin, "Tidak ada petani jagung yang naik haji di Gorontalo, ini yang saya tau". Selain pendapatan yang pas-pasan, bertanam jagung sering gagal tanam dan gagal panen karena musim kering yang panjang dan perubahan cuaca. Ini membuat petani mengalami kerugian dan mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan sosial. Biasanya para petani pindah ke tempat lain untuk mencari pekerjaan menjadi buruh tambang.

Pertanian Berteras dalam Mengurangi Erosi

Persoalan erosi dan dampak ikutan yang terjadi tentunya tidak hanya terjadi di Gorontalo. Di Indonesia, pertanian berkontur atau berundak-undak bukan hal yang baru, tetapi menjadi salah satu praktek untuk konservasi tanah dan air pada lahan berlereng. Pertanian sawah berundak sudah lama dipraktikkan di Bali dan beberapa tempat di Indonesia. Untuk perkebunan, dengan bantuan mesin, perusahaan sawit juga melakukan pembuatan teras. Akan tetapi biaya pembuatan teras mahal dan tidak mudah diterapkan oleh petani skala kecil dengan luasan lahan hanya 1-2 ha.



Oleh karena itu, dicari alternatif pertanian berteras yang dapat mengurangi erosi tapi dengan biaya yang lebih murah. Sejak tahun 1970an di Filipina, terutama untuk ladang jagung, dikembangkan teknologi SALT (*Sloping Agricultural Land Technology*) atau NVS (*Natural Vegetative Strips*) (Ilustrasi 1). Dengan teknik ini vegetasi alami yang tumbuh di kontur dapat menahan laju erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Teknik ini sudah terbukti dapat mengurangi erosi tanah, dalam kurun waktu 3-5 tahun dengan biaya yang murah.

Kegiatan AgFor Mendorong Pertanian Berteras dengan Sistem Agroforestri

Di Gorontalo, tim AgFor Sulawesi mencoba menjawab tantangan pengurangan erosi tanah ini dengan beberapa proyek percontohan pembuatan lahan berkontur di lahan petani binaan yang berlereng. Diawali dengan pelatihan yang diadakan di Desa Ayuhulalo oleh Dr. Agustin Mercado, Jr., seorang peneliti dari ICRAF Filipina yang telah berkecimpung di bidang ini selama 30 tahun. Dalam kurun waktu dua tahun (2015-2016), AgFor Sulawesi di Gorontalo telah melakukan 16 kali pelatihan tentang NVS ini dengan peserta 400 orang lebih. Pelatihan ini tidak hanya dimaksud untuk memperkenalkan pentingnya teknik sederhana ini, tetapi juga melakukan praktek langsung di lahan-lahan petani.

Training dan praktek dilakukan di Desa Ayuhulalo, Kab. Boalemo dan di Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo. Hasilnya, sudah ada beberapa lahan pertanian yang terbentuk teras lorong. Dalam waktu enam bulan, kontur sudah terbentuk dan vegetasi yang tumbuh dalam kontur dapat menahan aliran air yang membawa tanah di bagian atas. Seperti yang dituturkan oleh Wahyudi di Dulamayo Selatan, "Terlihat perbedaan ketika rumput (vegetasi) dibiarkan di lajur itu, tanah dari atas tertahan di situ. Dulu sering berlumpur di bawah kalau hujan tetapi sekarang sudah tidak begitu."

Beberapa petani di sekitar proyek percontohan mulai mempraktekkan pola pertanian

berteras. Model pertanian konservasi baru-baru ini juga dicoba diterapkan di Leato oleh FKH, sebuah forum peduli lingkungan hidup di Gorontalo. Vegetasi yang ditumbuhkan selain rumput dapat juga tanaman bernilai ekonomis seperti serai, rumput gajah serta *Arachis pintoii* (jenis kacang-kacangan) yang bersifat merekat tanah.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah meyakinkan petani untuk melakukan praktik konservasi ini. Akan tetapi, pendampingan yang secara intensif dengan memberikan informasi-informasi teknis yang dilakukan oleh tim AgFor, mampu merubah pola pikir petani. Selain itu, kesuksesan ini juga didorong oleh kegiatan tim AgFor bersama petani binaan dalam membuat pembibitan tanaman yang diinginkan oleh petani. Bibit yang dihasilkan kemudian ditanam di lahan yang berteras itu dengan pola agroforestri, dengan harapan tanaman kayu dapat menahan laju erosi.

Pola tani berkontur dan sistem pertanian agroforestri bisa menjadi sebuah jawaban untuk meminimalisir bahaya erosi. Kondisi lahan yang berlereng di Gorontalo membuat pentingnya penerapan model ini di lahan-lahan tani lainnya. Ini hanya bisa menjadi jawaban ketika pendekatannya bersifat massif pada lanskap dengan banyak petani melakukan hal yang sama dan bukan hanya oleh satu atau dua petani. Untuk itu dibutuhkan upaya dari segala pihak untuk mendorong pertanian berteras dengan sistem agroforestri sebagai langkah meminimalisir dampak yang terjadi akibat erosi tanah. ■



AgFor, kata mereka...

"Dengan pelatihan dan keterampilan yang diberikan AgFor untuk masyarakat desa, perbaikan kesejahteraan masyarakat mulai terlihat peningkatannya. Hal ini sangat meringankan pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam membangun dan membantu terciptanya kelestarian lingkungan di Bantaeng."
Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr
Bupati Bantaeng
Provinsi Sulawesi Selatan

"Penyuluh-penyuluh kita itu yang sudah dibina oleh AgFor, kita tingkatkan kapasitasnya. Dari segi [menanam] komoditi yang telah dibina oleh AgFor, terutama merica yang saat ini lagi *booming* harganya di Kolaka Timur dengan jumlah pemesan yang banyak dari luar kabupaten, bahkan luar provinsi, itu kita tindaklanjuti. Pemda memasukkan ke RPJMD dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas komoditi dengan pembinaan-pembinaan kepada petani kita dan penyuluh kita."
Dr. Ir. Idarwati, M.M
Kepala BP4K
Kabupaten Kolaka Timur
Provinsi Sulawesi Tenggara

"Kehadiran AgFor itu sendiri memberikan pemahaman, ilmu, dan pemberdayaan kepada petani sehingga mereka bisa mandiri. Mereka punya ilmu, dan mereka berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya untuk mereka sendiri."
Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si
Bupati Kolaka Timur
Provinsi Sulawesi Tenggara

"AgFor itu banyaaaak sekali manfaatnya. Setelah bergabung dengan AgFor, hasil panen saya, alhamdulillah, lipat dua kali dari yang dulunya."
Fatmawati

Petani dari Desa Jenetallasa
Provinsi Sulawesi Selatan

"Semua program kerja AgFor yang pernah dilakukan bersama dengan pemda setempat sangat bermanfaat. Insya Allah, kami tindaklanjuti dan komitmennya kita anggarkan di APBD kabupaten."
Ir. Misbawati A. Wawo, M.M

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan

"Tentu harapan kami, atas nama pemerintah daerah dan dinas perkebunan setempat, AgFor masih bisa berlanjut [lagi kegiatannya]."
Nurdin, SP, M.Si

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo

"AgFor sangat banyak memberikan bantuannya yang efektif. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan dan program untuk meningkatkan pengetahuan terhadap jajaran *stakeholder*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan AgFor semuanya dapat dimasukkan ke dalam RPJMD; mulai dari pengelolaan SDA yang berkelanjutan, konservasi air, penghijauan, dan manajemen lahan dengan sistem agroforestri."
Prof. Dr. Syamsu Alam, M.Si

Kepala Bappeda Bantaeng
Provinsi Sulawesi Selatan

"Yang paling menarik setelah pelaksanaan kegiatan AgFor selama lima tahun ini adalah mengembalikan semangat petani untuk kembali merawat kebunnya dengan sistem organik."
Gusti Kusuma

Koordinator LSM OWT
Provinsi Sulawesi Tenggara

"Peran aktif AgFor bersama *stakeholder* yang lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya Perda Kabupaten Bulukumba no.9/2015, suatu perda yang partisipatif dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia."
Andi Buyung Saputra, S.STP, M.M

Camat Tana Toa, Kajang
Provinsi Sulawesi Selatan

"Kehadiran AgFor membantu kami bagaimana memanen madu yang lestari dan higienis. [AgFor] juga gencar mempromosikan madu [kemasan kami] sampai ke ibukota provinsi dan tingkat nasional."
Kusman

Petani madu (pasoema)
dari Desa Tawanga
Provinsi Sulawesi Tenggara

"[Petani] penyuluh swadaya yang selama ini dibina oleh AgFor, sebanyak enam orang jumlahnya, alhamdulillah, telah kami berdayakan. Tahun ini, mereka sudah kami angkat, melalui SK Bupati, menjadi penyuluh PPS."
Muhammad Akbar, SP, M.Si

Kepala BP4KKP, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara

"Hasil kebun [binaan AgFor] ini saya simpan sedikit-sedikit. Sekarang, anak pertama sudah lulus sarjana ekonomi, yang kedua sarjana kesehatan, yang ketiga sarjana pendidikan bahasa Inggris. Baru saya simpan lagi sedikit-sedikit, saya beli oto [mobil]."
Hadjara Saipi

Petani dari Desa Ayuhulalo
Provinsi Gorontalo

World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115, PO Box 161
Bogor 16001, Indonesia
Telp: + 62 251 8625415
Fax: + 62 251 8625416
E-mail: icraf-indonesia@cgiar.org
blog.worldagroforestry.org

<http://www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia>



Canada



Kementerian PPN/
Bappenas

